PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DPRD

HIMPUNAN PROSES PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Padang, Desember 2025

@dprdprovsumbar https://dprd.sumbarprov.go.id/

Jl. S. Parman No.221, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR
RANPERDA APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
JUM'AT, 1 NOVEMBER 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. PLT. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI DAN PIMPINAN BUMD
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. PLT. Gubernur, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini Jum'at tanggal 1 November 2024, dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan Rancangan Perda APBD kepada DPRD, untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Dipindai dengan CamScanner

Namun, sebelum Rancangan Perda tentang APBD disusun dan disampaikan kepada DPRD oleh Kepala Daerah, didahului dengan pembahasan dan penetapan KUA-PPAS yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda APBD. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 Juli 2024 yang lalu, DPRD Periode Tahun 2019-2024 dan Gubernur Sumatera Barat, telah menyepakati KUA-PPAS Tahun 2025 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dalam KUA-PPAS Tahun 2025 tersebut, telah ditetapkan target makro ekonomi daerah, pendapatan daerah sebesar Rp. 5.658.065.098.875, belanja daerah sebesar Rp.5.727.882.128.033 dan pembiyaan daerah sebesar Rp. 69.817.029.158,-. Plafon pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tersebut, masih bersifat sementara dan tentatif, oleh karena pendapatan transfer masih mempedomani alokasi tahun 2024.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Tahun 2025, merupakan tahun yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dimana terdapat 2 (dua) kondisi penting yang terjadi yaitu terjadinya transisi kepemimpinan daerah pasca Pilkada Serentak Tahun 2024 dan dimulainya pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045. Berkenaan dengan hal itu, maka peran dan fungsi APBD Tahun 2025 menjadi sangat penting, untuk dapat mengakomodir 2 (dua) agenda strategis tersebut.

Sebagai APBD transisi kepimpinan daerah, maka dalam APBD Tahun 2025 tidak hanya mengakomodir program dan kegiatan Kepala Daerah yang menjabat saat ini, akan tetapi juga memberikan ruang untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Demikian juga sebagai starting point dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, maka target-target kinerja pembangunan daerah yang dicapai dalam APBD Tahun 2025, perlu disesuaikan dengan base line dari RPJPD Tahun 2025-2045 yang targetnya diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026,

Dipindai dengan CamScanner

terutama target dari 45 indikator utama pembangunan daerah.

Selanjutnya yang perlu juga kita pahami bersama, bahwa penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Ranperda APBD Tahun 2025, dilakukan sebelum ditetapkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dan ditetapkannya alokasi TKDD Tahun 2025 oleh Pemerintah.

Oleh sebab itu, muatan Ranperda APBD tahun 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, perlu kita lihat kembali apakah kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 terutama kebijakan yang bersifat khusus, telah sejalan dengan kebijakan yang terdapat dalam KUA-PPAS Tahun 2025 yang telah disepakati dan Ranperda APBD Tahun 2025, seperti sinkronisasi program prioritas pusat dan daerah yang bersifat imperatif, pemenuhan anggaran SPM, kebijakan koordinasi dan supervisi KPK, anggaran *kemiskinan* ekstrem, makan siang bergizi gratis dan serta alokasi TKDD.

Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini. Sesuai dengan pokok acara Rapat Paripurna kita ini, selanjutnya kepada PLT. Gubernur kita persilahkan untuk menyampaikan Pengantarnya terhadap Ranperda APBD Tahun 2025. Untuk itu, kepada Sdr. PLT. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Pengantar Ranperda APBD TA. 2025

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. PLT. Gubernur Sumatera Barat yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dari pengantar yang disampaikan oleh Sdr. PLT. Gubernur, kita sudah dapat mengetahui rencana anggaran Pemerintah Daerah yang akan terdapat dalam Ranperda

Dipindai dengan CamScanner

APBD Tahun 2025, yang mencakup rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terdiri atas :

Pendapatan di targetkan sebesar Rp. 5.658.065.098.875,- yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 2.525.209.886.875,-. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.114.980.012.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 17.875.200.000,-. Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 5.727.882.128.033,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 4.321.015.682.443,- belanja modal sebesar Rp.389.747.773.594,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan belanja transfer sebesar Rp. 997.118.671.995,-

Sdr. Plt. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda dan APBD yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Fraksi-Fraksi akan memberikan pandangan umum Fraksinya terhadap Ranperda APBD Tahun 2025 tersebut yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna hari senin tanggal 4 November 2024 besok.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan kepada masing-masing Fraksi, untuk dapat menyiapkan pandangan umum Fraksi-nya terhadap Ranperda APBD Tahun 2025. Kami berharap, Fraksi-Fraksi dapat melihat secara mendalam muatan Ranperda APBD Tahun 2025, agar dapat merumuskan pandangan umum Fraksi yang komprehensif, tajam dan korektif untuk penyempurnaan dari Ranperda APBD Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya Nota Pengantar terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan membacakan " Alhamdulillahirabbilalamin " Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, kami tutup.

Dipindai dengan CamScanner

..... (ketokan palu 3 x)

Terima kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb

Dipindai dengan CamScanner

PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN
JAWABAN GUBERNUR ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN 2025
SELASA, 5 NOVEMBER 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. PLT. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama, pada Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Selasa tanggal 5 November 2024, dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Pada Rapat Paripurna dewan kemaren, Senin tanggal 4 November 2024, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda APBD Tahun 2025. Dari pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, terdapat beberapa tanggapan dan pertanyaan yang cukup penting dan stratregis yang perlu dijelaskan dan ditanggapi oleh Gubernur terkait dengan

Dipindai dengan CamScanner

kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2205, diantaranya :

1. Ranperda APBD Tahun 2025 terlihat dalam kondisi yang pesimistis, dimana target pendapatan dan belanja yang diusulkan, jauh lebih rendah dari target tahun 2024 dan realisasi tahun 2023. Oleh sebab itu, perlu upaya yang sungguh-sungguh dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari pos PAD.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling kurang 40 % dan alokasi belanja pegawai maksimal 30 % dari total belanja daerah paling lama sampai tahun 2027. Sampai dengan rencana belanja tahun 2025, alokasi belanja insfrastruktur masih jauh dari yang diamanatkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus memiliki rencana anggaran yang untuk memenuhi alokasi anggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.

3. Sebagai APBD transisi, seperti apa kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk mengakomodir penyelarasan program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD Provinsi dengan program dan kegiatan yang dibiaya oleh APBN serta mengakomodir ruang untuk penyesuaian program prioritas Kepala Daerah terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Terkait dengan masukan, pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, tentu Pemerintah Daerah telah menyiapkan pula jawaban dan/atau tanggapannya yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini. Untuk itu, kepada Sdr. PLT. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Jawaban dan/atau Tanggapan
Gubernur terhadap PU Fraksi Ranperda APBD

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. PLT. Gubernur yang telah menyampaikan jawaban dan/atau

Dipindai dengan CamScanner

tanggapannya terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dari jawaban dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Sdr. PLT. Gubernur, secara prinsip telah dapat menjawab dan menjelaskan pertanyaan, tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi sebagaimana termuat dalam Pandangan Umum Fraksinya.

Namun demikian, apabila jawaban dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Sdr. PLT. Gubernur tersebut, masih ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, maka menurut hemat kami kita dalami nanti dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025 yang akan dilakukan oleh DPRD Bersama Pemerintah Daerah.

Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban dan/atau tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, maka pembahasannya telah dapat dilakukan oleh DPRD bersama

Pemerintah Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah.

Sebelum DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan, kami menyampaikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian nanti dalam pembahasan :

1. DPRD dan Pemerintah Daerah harus mengali kembali semua potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena masih banyak kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program prioritas daerah.
2. APBD Tahun 2025 merupakan starting point pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 yang penyusunannya bersifat imperative. Hampir semua target indicator kinerja utama Pembangunan daerah ditentukan langsung oleh Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, harus jelas pula dukungan Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk program maupun anggaran untuk pencapaian target RPJPD tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Paripurna, Undangan dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Jawaban atau tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum rapat ini ditutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terhadap hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan " Alhamdulillahirabilalamin" rapat paripurna DPRD pada hari ini dalam rangka penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima Kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wss.wr.wb

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PENGANTAR NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

PADANG, 1 NOVEMBER 2024

==========

ASSALAMUALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH.

YTH. SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMAATERA BARAT.

YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA SKPD/BIRO/RSD LINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. REKAN-REKAN PERS, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Dipindai dengan CamScanner

MENGAWALI KEGIATAN INI, MARILAH KITA HATURKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT. KARENA ATAS KARUNIA DAN KEBERKAHANNYALAH KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025.

SHALAWAT DAN SALAM KITA MOHONKAN JUGA KEPADA ALLAH SWT. AGAR SELALU TERCURAH KEPADA RASULULLAH MUHAMMAD SAW. YANG KITA HARAPKAN SYAFATNYA DI YAUMUL AKHIR NANTI.

SAUDARA PIMPINAN DAN PARA ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.

TAHUN 2025 MERUPAKAN TAHUN PERTAMA DARI PELAKSANAAN AGENDA RPJPN DAN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045. MAKA, SEBAGAI BAGIAN DARI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL, APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 AKAN DIARAHKAN SERTA DIFOKUSKAN PADA PELAKSANAAN TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKESINAMBUNGAN, TERENCANA DENGAN BAIK

Dipindai dengan CamScanner

SESUAI DENGAN KORIDOR TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH AGAR DAPAT TERCAPAI TEPAT WAKTU. NAMUN DEMIKIAN, MENYIKAPI PERKEMBANGAN PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DI TINGKAT NASIONAL YANG SAAT INI DALAM MASA TRANSISI KEPEMERINTAHAN, MAKA KITA MEMPERKIRAKAN NANTINYA AKAN TERDAPAT BEBERAPA ISU DAN KEBIJAKAN BARU YANG HARUS DIIKUTI DAERAH SEBAGAI BENTUK KESELARASAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

MENYIKAPI HAL TERSEBUT MAKA DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGRAN 2025, 7 (TUJUH) MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026 TETAP DIPERTAHANKAN MENJADI 7 (TUJUH) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 SEBAGAI UPAYA MENJAGA KESINAMBUNGAN RKPD DENGAN RPJMD, SERTA MENGOPTIMALKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN UNTUK MENGAWAL PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.

ADAPUN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RKPD TAHUN 2025 DAN MENJADI ACUAN KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2025, YAITU:

1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERPENGETAHUAN, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING;

Dipindai dengan CamScanner

2. MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA' – SYARA' BASANDI KITABULLAH;
3. MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN;
4. MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH (IKM) SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL;
5. MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN BERDAYA SAING KEPARIWISATAAN;
6. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN; DAN
7. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS.

PELAKSANAAN 7 (TUJUH) PRIORITAS PEMBANGUNAN TERSEBUT DI ATAS DIARAHKAN UNTUK MELAKSANAKAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025 YAITU: **"AKSELERASI PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"** YANG DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

Dipindai dengan CamScanner

1. AKSELERASI PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS EKONOMI TETAP DIFOKUSKAN PADA 3 (TIGA) SEKTOR STRATEGIS SUMATERA BARAT DENGAN DISTRIBUSI PDRB TERBESAR YAKNI SEKTOR PERTANIAN, SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI SERTA SEKTOR PARIWISATA.
2. AKSELERASI PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN GUNA MENGHADAPI TANTANGAN KETAHANAN PANGAN DI MASA YANG AKAN DATANG DENGAN MENINGKATKAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG SERTA TANAMAN STRATEGIS LAINNYA.
3. AKSELERASI PRODUKTIVITAS SEKTOR PERDAGANGAN DAN IKM BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS IKM MELALUI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, PENINGKATAN KUALITAS PRODUK, DAN PENINGKATAN AKSES KE PASAR DAN SUMBER DAYA.
4. AKSELERASI PRODUKTIVITAS SEKTOR PARIWISATA BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PARIWISATA GUNA MENGHADAPI TANTANGAN PERKEMBANGAN ZAMAN SEHINGGA DIHARAPKAN SEKTOR PARIWISATA MAMPU

Dipindai dengan CamScanner

MENOPANG SECARA SIGNIFIKAN PENINGKATAN KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH MERATA.

5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGUATAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN DAERAH, PEMERATAN PENDAPATAN, PENGURANGAN KEMISKINAN SERTA MEMASTIKAN SELURUH MASYARAKAT MENDAPATKAN KEMUDAHAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR MINIMAL.

MELALUI TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025 TERSEBUT DI ATAS, DIHARAPKAN AKAN TERJADI REFORMASI STRUKTURAL YANG DIWUJUDKAN MELALUI BERBAGAI PROGRAM YANG DAPAT DILAKSANAKAN DALAM JANGKA PENDEK. PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT DIHARAPKAN MAMPU MENDORONG TERCAPAINYA AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGUATAN KESEJAHTERAAN ATAU *WELL-BEING*.

AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DAPAT DITEMPUH MELALUI PENGUATAN INVESTASI, KUALITAS TENAGA KERJA, DAN PRODUKTIVITAS. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MENJADI KUNCI UNTUK MENGAKSELERASI PERTUMBUHAN

Dipindai dengan CamScanner

EKONOMI YANG TINGGI MELALUI PERBAIKAN INFRASTRUKTUR, REGULASI, DAN EFISIENSI BIROKRASI. DENGAN KEBIJAKAN TERSEBUT, MAKA DITARGETKAN PADA TAHUN 2025 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT DAPAT MENCAPAI 5,05% DENGAN PDRB PERKAPITA SEBESAR RP62,29 JUTA. KITA OPTIMIS KARENA ADANYA TREND POSITIF HARGA CPO DAN KARET DUNIA YANG AKAN MENDORONG PERTUMBUHAN DI SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN. SELAIN ITU, EFEK POSITIF DARI PERHELATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI TAHUN 2024 DIHARAPKAN MEMBAWA KEPASTIAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN OLEH PEMERINTAH. KONDISI LAIN YANG BERPENGARUH ADALAH PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG – PEKANBARU YANG MENDORONG TUMBUHNYA INVESTASI DI KORIDOR PERTUMBUHAN EKONOMI UTAMA SUMATERA BARAT.

SELANJUTNYA BERBAGAI PROGRAM UNGGULAN JUGA AKAN DILAKUKAN UNTUK PENGUATAN *WELL-BEING* ANTARA LAIN MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN BERMUTU DAN BERDAYA SAING, KESEHATAN YANG BERKUALITAS, SERTA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG EFEKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN. SELAIN ITU JUGA AKAN DILAKUKAN PENGUATAN *LINK AND MATCH* DENGAN PASAR

Dipindai dengan CamScanner

TENAGA KERJA YANG MERUPAKAN SALAH SATU STRATEGI UTAMA DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN ANTARA DUNIA PENDIDIKAN DAN INDUSTRI. KEMUDIAN YANG TIDAK KALAH PENTING ADALAH UPAYA PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING YANG MERUPAKAN ISU PRIORITAS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SDM.

SEHINGGA PADA TAHUN 2025, DITARGETKAN INDIKATOR-INDIKATOR MAKRO TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERUS MEMPERLIHATKAN PERBAIKAN KINERJA DIANTARANYA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENINGKAT MENJADI 77,41; TINGKAT KEMISKINAN DAPAT DITURUNKAN MENJADI 5,65%; DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERUS DITEKAN MENJADI 5,55%.

SAUDARA PIMPINAN DAN PARA ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

UNTUK MEWUJUDKAN TARGET TERSEBUT DI ATAS, KITA TELAH MENYUSUN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG KOMPREHENSIF DAN BERKUALITAS SEBAGAIMANA TELAH TERTUANG DALAM KESEPAKATAN KUA DAN PPAS TAHUN 2025 YANG KITA SEPAKATI PADA TANGGAL 27 JULI 2024 YANG LALU. SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN YANG BERPERAN MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN DAERAH, APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 DIHARAPKAN DAPAT

Dipindai dengan CamScanner

MENJADI KATALISATOR BAGI PEREKONOMIAN DAERAH TERUTAMA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DAN MENGURANGI EKONOMI BERBIAYA TINGGI. SECARA GARIS BESAR, KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 YANG DIAJUKAN, AKAN KAMI JELASAKAN SEBAGAIMANA URAIAN DI BAWAH INI.

A. KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA PENDAPATAN DAERAH YANG AKAN DITUANGKAN DALAM RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 MERUPAKAN PERKIRAAN YANG TERUKUR, RASIONAL SERTA MEMILIKI KEPASTIAN DASAR HUKUM PENERIMAANNYA. NAMUN KHUSUS UNTUK PENDAPATAN TRANSFER, MASIH DIPROYEKSIKAN SAMA DENGAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2024. PENDAPATAN DAERAH YANG TERDIRI DARI 3 (TIGA) KELOMPOK, YAKNI: PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

PADA TAHUN 2025, SELURUH PEMERINTAH DAERAH SUDAH DIWAJIBKAN UNTUK MELAKSANAKAN AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENGANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAHAN DAERAH, SECARA PENUH. HAL INI BERDAMPAK PADA RENCANA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG MENGALAMI PENURUNAN YANG CUKUP SIGNIFIKAN DARI SISI PENDAPATAN ASLI DAERAH KARENA ADANYA PORSI OPSEN PAJAK YANG LANGSUNG DIAKUI SEBAGAI BAGIAN PAD KABUPATEN/KOTA.

PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DIANGGARKAN SEBESAR RP5,65 TRILYUN LEBIH. PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025 DIRENCANAKAN BERASAL DARI SUMBER-SUMBER BERIKUT:

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2025 DI PROYEKSIKAN SEBESAR RP2,52 TRILYUN LEBIH. ATAU TURUN SEBESAR (14,10%) BILA DIBANDINGKAN TARGET TAHUN 2024. URAIAN DARI JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1) PAJAK DAERAH

PAJAK DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP1,87 TRILYUN LEBIH YANG TERBAGI ATAS:

- PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TAHUN 2025 SEBESAR RP525 MILYAR LEBIH

Dipindai dengan CamScanner

ATAU TURUN 39,42% DARI TARGET TAHUN 2024.

- BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TAHUN 2025 SEBESAR RP261 MILYAR LEBIH ATAU TURUN 42,95% DARI TARGET TAHUN 2024.
- PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) TAHUN 2025 SEBESAR RP619 MILYAR LEBIH ATAU TURUN 10,06% DARI TARGET TAHUN 2024.
- PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN 2025 SEBESAR RP11,44.MILYAR LEBIH ATAU TURUN 42,76% DARI TARGET TAHUN 2024.
- PAJAK ROKOK TAHUN 2025 SEBESAR RP446 MILYAR LEBIH ATAU TURUN 13,90% DARI TARGET TAHUN 2024.

2) RETRIBUSI DAERAH

PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DITARGETKAN SEBESAR RP421 MILYAR LEBIH, ATAU NAIK 9,65% DIBANDINGKAN TARGET TAHUN ANGGARAN 2024. RETRIBUSI DAERAH TERDIRI DARI:

- RETRIBUSI JASA UMUM SEBESAR RP410 MILYAR LEBIH;
- RETRIBUSI JASA USAHA SEBESAR RP10,42 MILYAR LEBIH; DAN

Dipindai dengan CamScanner

- RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SEBESAR RP393 JUTA LEBIH.

KENAIKAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025 BERSUMBER DARI PENYESUAIAN PENDAPATAN BLUD, KHUSUSNYA JASA LAYANAN YANG SEBELUMNYA DIANGGARKAN PADA LAIN-LAIN PAD YANG SAH SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

3) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BERASAL DARI BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. PADA TAHUN ANGGARAN 2025 DITARGETKAN SEBESAR RP144 MILYAR LEBIH.

4) LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH

LAIN-LAIN PAD YANG SAH PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DIANGGARKAN SEBESAR RP82,83 MILYAR LEBIH ATAU, NAIK 53,07% DARI TARGET TAHUN ANGGARAN 2024.

Dipindai dengan CamScanner

PENDAPATAN TRANSFER

PROYEKSI PENERIMAAN DARI PENDAPATAN TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2025 ADALAH SEBESAR RP3,11 TRILYUN LEBIH, ATAU TURUN 9,74% DARI ANGGARAN TAHUN 2024, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1) DANA BAGI HASIL (DBH) SEBESAR RP129 MILYAR LEBIH;
2) DAU SEBESAR RP2,06 TRILYUN LEBIH;
3) DAK NON FISIK SEBESAR RP922 MILYAR LEBIH;
4) PENERIMAAN DARI DAK FISIK DAN TRANSFER ANTAR DAERAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN MASIH BELUM DIANGGARKAN.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PADA TAHUN ANGGARAN 2025 DIPROYEKSIKAN SEBESAR RP17,87 MILYAR LEBIH, ATAU NAIK 5,00% DIBANDINGKAN ANGGARAN TAHUN 2024.

SAUDARA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.

UNTUK MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KHUSUSNYA PAD TAHUN

Dipindai dengan CamScanner

2025 MAKA PEMERINTAH DAERAH AKAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT:

1) PENYESUAIAN REGULASI SEBAGAI DASAR HUKUM PEMUNGUTAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN;
2) PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
3) PENGGALIAN POTENSI PENDAPATAN BARU SESUAI KEWENANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TERUTAMA DI LUAR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
4) MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI;
5) MENDORONG PEMBENTUKAN SISTEM PEMBAYARAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BANK/LEMBAGA KEUANGAN;
6) MEMPERLUAS KANAL PEMBAYARAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI E-COMMERCE;

Dipindai dengan CamScanner

7) MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PERANAN PIHAK KETIGA DALAM PENYEDIAAN BIAYA PEMBANGUNAN DAERAH;

8) MELAKUKAN SINERGITAS PEMUNGUTAN PKB, BBNKB, OPSEN PKB, OPSEN BBNKB DAN OPSEN MBLB, KHUSUS UNTUK OPSEN MBLB MERUPAKAN JENIS PAJAK BARU BAGI PEMERINTAH PROVINSI.

B. KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DIRENCANAKAN SEBESAR RP5,72 TRILYUN LEBIH ATAU TURUN SEBESAR 15,99% DARI BELANJA TAHUN 2024. PADA RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 INI, KHUSUS UNTUK BELANJA DAERAH, SECARA TOTAL DIPROYEKSIKAN SAMA DENGAN KUA DAN PPAS YANG TELAH DISEPAKATI PADA TANGGAL 27 JULI 2024 NAMUN PADA LEVEL JENIS BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL TERDAPAT PERBEDAAN DENGAN KUA DAN PPAS YANG TELAH DISEPAKATI, HAL INI DISEBABKAN ANTARA LAIN:

1. SURAT EDARAN BERSAMA MENDAGRI DAN KEPALA BAPPENAS NOMOR 600.2.1/3674/SJ DAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMUTAKHIRAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dipindai dengan CamScanner

PROVINSI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

2. SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 900.1.1/847.A/APKD/BPKAD-2024 TANGGAL 20 AGUSTUS 2024 PERIHAL TINDAK LANJUT SURAT EDARAN BERSAMA MENDAGRI DAN KEPALA BAPPENAS TERHADAP PENYUSUNAN RKA SKPD.

BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 DIALOKASIKAN PADA 4 (EMPAT) KELOMPOK BELANJA DAERAH SEBAGAI BERIKUT:

BELANJA OPERASI

BELANJA OPERASI DIPROYEKSIKAN SEBESAR RP4,32 TRILYUN LEBIH ATAU TURUN 7,80%. DARI ANGGARAN TAHUN 2024. BELANJA OPERASI TERSEBUT DIRENCANAKAN UNTUK:

1) BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP2,64 TRILYUN LEBIH;
2) BELANJA BARANG DAN JASA SEBESAR RP1,58 TRILYUN LEBIH;
3) BELANJA SUBSIDI SEBESAR RP6,5 MILYAR; DAN
4) BELANJA HIBAH SEBESAR RP86,81 MILYAR LEBIH.

Dipindai dengan CamScanner

BELANJA MODAL

PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2025 BELANJA MODAL DIANGGARKAN SEBESAR RP389 MILYAR LEBIH ATAU TURUN 50,21% DARI ANGGARAN TAHUN 2024. BELANJA MODAL TERSEBUT DIRENCANAKAN UNTUK:

1) BELANJA MODAL TANAH SEBESAR RP22,59 MILYAR LEBIH;
2) BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN SEBESAR RP70,21 MILYAR LEBIH;
3) BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR RP97,53 MILYAR LEBIH;
4) BELANJA MODAL JALAN JARINGAN DAN IRIGASI SEBESAR RP198 MILYAR LEBIH; DAN
5) BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA SEBESAR RP828 JUTA LEBIH.

BELANJA TIDAK TERDUGA

PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2025 BELANJA TIDAK TERDUGA DIANGGARKAN SEBESAR RP20 MILYAR, ATAU BERKURANG 57,39% DARI ANGGARAN TAHUN 2024.

Dipindai dengan CamScanner

BELANJA TIDAK TRANSFER

PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DIPROYEKSIKAN SEBESAR RP997 MILYAR LEBIH, ATAU TURUN 23,40% DIBANDINGKAN ANGGARAN TAHUN 2024. BELANJA TRANSFER TERSEBUT DIRENCANAKAN UNTUK:

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK SEBESAR RP952 MILYAR LEBIH; DAN
2) BELANJA BANTUAN KEUANGAN SEBESAR RP45 MILYAR.

SAUDARA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 DIARAHKAN DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP *MONEY FOLLOW PROGRAM PRIORITY* YANG AKAN MEMPRIORITASKAN PROGRAM/KEGIATAN BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB, PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA, PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR, PELESTARIAN NILAI BUDAYA, DAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG FOKUS TEMATIK, YAITU:

a. MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PEMENUHAN URUSAN WAJIB SEPERTI URUSAN PENDIDIKAN MINIMAL 20% DARI APBD, BELANJA

Dipindai dengan CamScanner

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM, BELANJA URUSAN WAJIB LAINNYA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN BELANJA MODAL UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK.

b. DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN 37,5% DARI REALISASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK BAGIAN HAK PROVINSI YANG DIUTAMAKAN PENGGUNAANNYA UNTUK PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAN JKN MENUJU *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*.

c. MENGALOKASIKAN BELANJA YANG MERUPAKAN MANDATORY DARI PEMERINTAH PUSAT ANTARA LAIN PEMENUHAN SPM PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS BMCKTR, DINAS PERKIMTAN, SATPOL PP; DARI DANA TRANSFER UMUM.

d. DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM KOORDINASI DAN SUPERVISI KPK DALAM MELAKUKAN TUGAS PENCEGAHAN, KOORDINASI DAN MONITORING TINDAK PIDANA KORUPSI, MAKA AKAN MENGUPAYAKAN PEMENUHAN ANGGARAN APIP SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dipindai dengan CamScanner

e. MENGALOKASIKAN ANGGARAN YANG MEMADAI UNTUK PEMENUHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN RPJMD TAHUN 2021-2026 YANG TERSEBAR PADA URUSAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI.

f. MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG STRATEGIS DAERAH.

g. SINGKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

h. MEMENUHI KEBUTUHAN BELANJA PEGAWAI TERKAIT GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, ANGGOTA DPRD TERMASUK DIDALAMNYA UNTUK PEMBAYARAN TPP-ASN DAN PENAMBAHAN TENAGA PPPK. HAL INI JUGA MENCAKUP TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG), TUNJANGAN KHUSUS GURU (TKG), TAMBAHAN PENGHASILAN GURU SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU UNTUK DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR DAN TERPENCIL (3T).

Dipindai dengan CamScanner

C. KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

PADA RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025, PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH HANYA DIALOKASIKAN DARI SUMBER SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU (SILPA) SEBESAR RP100,81 MILYAR LEBIH, ATAU TURUN (59,90%) DARI ESTIMASI SILPA TAHUN 2024.

SEMENTARA PADA POS PENGELUARAN PEMBIAYAAN, PADA TAHUN ANGGARAN 2025 DIALOKASIKAN PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KE BANK NAGARI SEBESAR RP20 MILYAR.

SAUDARA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

DEMIKIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN INI KAMI SAMPAIKAN DIHADAPAN SIDANG PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG TERHORMAT SECARA UMUM DAN RINGKAS. SUBSTANSI YANG LEBIH RINCI DAN MENDETAIL DAPAT KITA LIHAT PADA DOKUMEN NOTA KEUANGAN SERTA RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 YANG TELAH KAMI SERAHKAN SEBELUMNYA. HARAPAN KAMI INI DAPAT SEGERA DIBAHAS BERSAMA DAN BISA KITA SEPAKATI SESUAI

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL YANG DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

KAMI MENYADARI, BAHWA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 INI BELUM SEPENUHNYA MENJAWAB SELURUH KEBUTUHAN DAN ASPIRASI YANG BERKEMBANG DI TENGAH MASYARAKAT, KARENA TERBATASNYA KEUANGAN DAERAH DAN SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN. MUDAH-MUDAHAN SEMUA KETERBATASAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI, DAPAT MEMACU KITA UNTUK TERUS BERINOVASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT SUMATERA BARAT.

SELANJUTNYA, MENINDAKLANJUTI SURAT DIRJEN. PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR S-116/PK/2024 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2024 HAL PENYAMPAIAN RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA. 2025, MAKA KAMI BERHARAP DALAM TAHAP PEMBAHASAN RANPERDA APBD TAHUN 2025 INI KITA DAPAT MENYESUAIKAN BERSAMA RANPERDA YANG TELAH DISAMPAIKAN INI DENGAN ALOKASI PENDAPATAN TRANSFER YANG DEFINITIF.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN MOHON MAAF BILA ADA HAL YANG TIDAK PADA TEMPATNYA.

Dipindai dengan CamScanner

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH.

WASSALAMUALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH.

PADANG, 1 NOVEMBER 2024
Plt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

AUDY JOINALDY

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/Kepala di Lingkup Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.
Yth. Para Wartawan, undangan serta hadirin yang berbahagia.
Hadirin yang kami muliakan,

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat Paripurna Yang Terhormat ini atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Seizin Pimpinan Rapat Paripurna ini kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena dengan seizin-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, serta mari kita sampaikan shalawat dan salam kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan-minazzulumati ilannur sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Dipindai dengan CamScanner

Hadirin yang kami muliakan,

Seperti kita ketahui bahwa APBD adalah merupakan bahagian dari perencanaan seluruh kegiatan pemerintahan dalam satu tahun anggaran, dan di dalam kegiatan-kegaitan pemerintahan tersebut harus merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan/terputus sehingga apa yang ingin dicapai ditahun-tahun sebelumnya akan menjadi dasar untuk meningkatkan lebih baik lagi, dan semua kegiatan tersebut harus berdampak posistif bagi Pembangunan Sumatera Barat, namun jika ada kegiatan yang tidak tertampung/tertunda ditahun anggaran sebelumnya maka itu akan ditampung/ditindaklanjuti di tahun anggaran berikutnya. Dapat kita simpulkan bahwa APBD itu dari tahun-ketahun harus berkelanjutan/sustainable, serta apabila dalam perjalanan APBD tersebut karena faktor-faktor tertentu jika diperlukan perubahan maka akan dilakukan Perubahan APBD. Hari Jum'at kemarin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggran 2025 dan sebelum itu telah disampaikan Nota Keuangan Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ke dua bahan ini kami baca dan pelajari sebagai bahan untuk pandangan umum Fraksi kami yang kami sampaikan berupa pertanyaan-pertanyaan/saran-saran bahkan kritikan yang bersifat membangun yang akan menjadi pembahasan selanjutnya, sebagai berikut:

1. Kita semua tentu sudah dapat mengetahui serta memahami terhadap kondisi perekonomian di republik yang kita cintai ini, bahwa pada saat ini kondisi perekonomian sedang mengalami tidak baik-baik saja dikarenakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengalami devisit, berkaca dari pengalaman selama ini bahwa Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat sangat bergantung dengan Belanja Pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota) untuk itu Fraksi kami mengingatkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 ini sudah bisa mengantisipasi terhadap kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik tersebut, mohon penjelasan.
2. Sehubung dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mengakibatkan adanya penurunan signifikan pada struktur APBD Tahun Anggaran 2025 dari APBD Tahun Anggaran 2024, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memformulasikan APBD Tahun Anggaran 2025 ini agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai program yang tepat dan

Dipindai dengan CamScanner

terukur untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Fraksi Kami melihat upaya menggenjot pendapatan daerah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan pengelolaan aset-aset dan sumber daya alam yang dimiliki pada tahun-tahun sebelumnya belum maksimal. Selain itu Fraksi kami juga meminta meski APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan, tetapi jangan sampai mengurangi program-program prioritas kerakyatan. Bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal itu dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar tetap jadi perhatian dan dapat dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Sumatera Barat, mohon penjelasan.

3. Berkaitan dengan poin dua (2) di atas bahwa salah satu terdampak dari penurunan postur APBD Tahun Anggaran 2025 ini diantaranya pendapatan transfer/pembagian pendapatan antar daerah dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dimana dalam pembagian tersebut terjadi ada yang bertambah dan ada pula yang berkurang. Terhadap persoalan ini terutama pada penerimaan pendapatan yang berkurang, Fraksi kami meminta Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah harus dapat mengantisipasinya karena Pemerintah Provinsi yang dikepalai oleh Gubernur dalam Penataan hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tata pemerintahan dengan pola yang baik dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat di mana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, mohon penjelasan.
4. Tentang Pendapatan Daerah, di dalam Nota Pengantar dibunyikan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp 5.658.065.098.000,- yang berasal dari 1). PAD sebesar Rp. 2.525.209.886.875,- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.114.980.012,- 3). Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 17.875.200,- jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan, terhadap hal ini menurut Fraksi kami melihat pada posisi Pendapatan Daerah ini masih bisa kita tingkatkan terutama di sector retribusi daerah yang tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 9,65% dari pada tahun 2024 yang lalu, serta Hasil Pengelalolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan pendataan serta optimalisasi, mohon penjelasan.
5. Di dalam Nota Pengantar pada '*Akselerasi Produktifitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Ingklusif dan Berkelanjutan*' yang terdiri dari lima (5) poin dimana salah satu poin membunyikan *Akselerasi*

Dipindai dengan CamScanner

Produktifitas Sector Pertanian Ditujukan Untuk Peningkatan Produktifitas Pertanian Guna Menghadapi Tantangan Ketahanan Pangan Dimasa Yang Akan Datang Dengan ***Meningkatkan Produksi Padi Dan Jagung*** *Serta Tanaman Strategis Lainnya,* Fraksi kami ingin bertanya apakah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah punya data tentang berapa jumlah lahan produksi padi kita saat ini? Karena kita ketahui semakin hari lahan untuk produksi padi semakin berkurang dikarena sudah ditukar menjadi lahan perumahan, selanjutnya apakah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah mempunyai data tentang lahan penanaman jagung? Serta berapa kebutuhan pupuk subsidi yang diperlukan dan berapa yang tersedia? pertanyaan ini sangat penting bagi Fraksi kami tanyakan agar pelaksanaan tujuh (7) Prioritas Pembangan Daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 ini dapat berjalan dengan baik, mohon penjelasan

6. Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal kepada BUMD, dimana untuk tahun 2025 ini mengalami peningkatan sebesar 15,54%, Fraksi kami tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa terhadap BUMD-BUMD yang tidak memberikan konstribusi pada Pendapatan Daerah sebagaimana dari tujuan terbentuknya BUMD tersebut sebaiknya BUMD tersebut di lakukan evaluasi dan koreksi. Mohon penjelasan.
7. Tentang Belanja Daerah, Fraksi kami melihat bahwa di dalam Nota Keuangan dijelaskan untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.5.727.882.128.034,- turun sebesar 15.99% dibandingkan pada APBD Tahun 2024 dengan rincian diantaranya disektor Belanja Operasi Rp. 4.321.015.682.443,01 atau turun sebesar 7,80 %, **Belanja Modal Rp. 389.045.656.074,01 turun sebesar 50,21%,** menurut Fraksi kami bahwa anggaran pada sector Belanja Modal sangat penting dalam pembanguan daerah yang seharusnya belanja modal ini harus ditingkatkan, terkait dengan hal ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menanyakan apakah Belanja Daerah ini telah memenuhi unsur pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien? Khususnya pada Belanja Modal yang turun sangat signifikan sekali, dan apakah hal tersebut dapat mengakomodir tercapainya target dan tujuan dari peningkatan infrastruktur untuk penunjang produktivitas masyarakat ? Mohon penjelasan
8. Masih Tentang Belanja Daerah, kita ketahui bahwa Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang rawan bencana alam seperti; banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin putting bluing, badai, abrasi pantai, namun di dalam APBD Tahun Anggaran 2025 hanya ditempatkan sebesar Rp. 20.000.000.000.- turun sebesar 57,39% seharusnya anggaran di

Dipindai dengan CamScanner

sector ini minimalnya stabil dengan anggaran sebelumnya, mohon penjelasan.

9. Fraksi kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Belanja yang telah didasari *money follow program priority*, namun Faksi kami minta juga agar azaz berkeadilan dan merata tetap juga menjadikan prinsip utama di dalam membangun Provinsi Sumatera Barat yang kita cintai ini yang jumlah Kabupaten/Kotanya sebanyak 19 terutama untuk Kabupaten Kepulaun Mentawai, mohon penjelasan.
10. Masih Tentang Belanja Daerah yang telah teralokasikan dengan prinsip *money follow program priority* serta berlandaskan prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan prioritas pembanguan daerah, pandangan Fraksi kami Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat masih bisa melakukan efisien, efektif terutama pada Belanja Operasi diposisi Belanja Pegawai, mohon penjelasan.
11. Sebagaimana yang kami sampaikan pada poin tiga (3) di atas bahwa pembagian pendapatan ke daerah yang penerimaanya rendah, Fraksi kami melihat salah satu yang paling terdampak itu adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk itu Fraksi kami meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat kiranya melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan terutama melaksanakan pembanguan yang telah direncankan di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu pembangunan **Unit SAMSAT** yang hingga saat ini belum terlaksana, jika kemudian pembangunan Unit SAMSAT tersebut tidak terlaksana maka Fraksi kami mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat apa yang disebut dengan pembangunan yang adil dan merata di daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat itu, mohon penjelasan.
12. Apakah postur APBD Tahun Anggaran 2025 ini telah menekankan prioritas APBD pada peningkatan Pendidikan? Fraksi kami melihat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat penting untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengedepankan sektor Pendidikan, diantaranya meningkatkan infrastruktur dunia pendidikan terutama di wilayah pinggiran seperti yang tercantum pada RKPD tanpa meninggalkan sector lain seperti Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur. Sekait dengan pertanyaan ini Fraksi kami melihat perlunya **penambahan alokasi anggaran** untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mengingat dampaknya yang langsung terhadap masyarakat, mohon penjelasan.

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, dan para hadirin yang berbahagia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 ini kami sampaikan, selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan dan PKB siap untuk membahas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 ini lebih mendalam lagi. Atas segala perhatian Rapat Paripurna yang terhormat ini kami ucapkan terimaksih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 04 November 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman, SE Ketua	**DONIZAR** Sekretaris

VAREL ORIANO
Juru Bicara

Dipindai dengan CamScanner

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2024 – 2029

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DISAMPAIKAN OLEH : DONI HARSIVA YANDRA, S.IP, M.E

DALAM

SIDANG PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 4 NOVEMBER 2024

Dipindai dengan CamScanner

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE 2024 – 2029

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Bismillahirahmanirrahhim

Assalamualaikum Wr Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang kami hormati;

- Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Sekretaris Daerah / Staff Ahli / Asisten / Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Kantor / Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se- Sumatera Barat
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan

Sembari mengharap Rahmat dan RidhaNya, dalam kesempatan pertama ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wat 'ala*, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir untuk saling bersilaturrahmi dan saling berintegrasi pemikiran dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Nota Pengantar APBD Tahun 2025, Aamiiin.

Dipindai dengan CamScanner

Salawat dan salam kita haturkan sebesar besarnya kepada junjungan Islam Nabiyullah Muhammad Salalallahu Hu A'laihi Wassalam, yang telah berjasa besar bagi kemajuan dunia selayaknya yang kita sama-sama rasakan di saat ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana Amanah konstitusi yang diaktualisasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diimplementasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, yang diadaptasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dan secara teknis di susun dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terhitung sejak dilantik sebagai kepala daerah sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Dalam konteks singkronisasi Pembangunan nasional dan daerah, **Tahun 2025** merupakan masa transisi sekaligus *starting point* bagi pelaksanaan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045, oleh karenanya maka daerah mesti mampu memprediksi potensi isyu dan kebijakan-kebijakan baru yang akan diterapkan ditingkat nasional yang harus diselaraskan dengan perencanaan dan pengelolaan kebijakan Pembangunan di daerah.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Menanggapi Pengantar Gubernur Sumatera Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, yang dibacakan oleh ***Sdr. Gubernur*** dalam hal ini **Sdr Plh. Sekda Provinsi Sumatera Barat** pada hari Jumat, *tanggal 1 November 2024*, maka setelah melihat, membaca, memperhatikan dan menganalis Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud, izinkanlah **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan pandangan dan tanggapan serta catatan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat, Saudara Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, dalam hal ini Fraksi Partai Demokrat mengucapkan **terima kasih dan apresiasi** yang sebesar besarnya.
2. Fraksi Partai Demokrat menilai **Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025** merupakan etalase informasi awal dari APBD 2025, yang mestinya dipahami tidak hanya sebagai instrument keuangan dalam pelaksanaan visi, misi, program unggulan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 belaka, akan tetapi lebih dari itu juga memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraannya, oleh karenanya APBD 2025 sebagai APBD terakhir dan penutup di masa pemerintahan Sdr. Gubernur - Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2026 harus hadir dengan semangat yang pamungkas untuk menuntaskan visi, misi, program unggulan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan tersebut, namun menurut hemat kami penyampaian nota pengantar sepertinya terlalu di simplikasi, sehingga informasi yang disampaikan tidak mampu menggambarkan kisi-kisi APBD 2025 yang berkesinambungan, terencana, adaptif dan fleksibel sebagaimana Tema Pembangunan Tahun 2025 Yaitu Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Ingklusif Dan Berkelanjutan, untuk itu kepada **Saudara Gubernur dimohon penjelasannya.**
3. Fraksi Partai Demokrat menyadari dengan sesungguhnya dinamika ekonomi dewasa ini yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal luar negeri dan Kawasan, disamping dinamika internal yang terjadi didalam negeri dengan tengah berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh Provinsi dan Kota/Kabupaten di Indonesia. Sehingga hal ini turut mempengaruhi jumlah pendapatan daerah dari berbagai sektor yang sudah direncanakan. Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, baik terhadap Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah diproyeksikan sama dengan KUA-PPAS Tahun 2025 yang telah disepakati pada tanggal *27 Juli 2024*, yaitu sebesar Rp.5,658 Triliun, sementara Belanja Daerah sebesar Rp. 5, 727 Triliun atau mengalami defisit sekitar Rp 69,817 Miliar.

Dipindai dengan CamScanner

Namun pada level jenis belanja operasional dan belanja modal terdapat perbedaan dengan KUA-PPAS Tahun 2025, Oleh sebab itu perlu upaya yang lebih kuat dan sungguh-sungguh untuk dapat meningkatkan target pendapatan dan belanja yang ditampung nantinya pada Ranperda APBD Tahun 2025. **Mohon penjelasannya, strategi apa yang perlu dilakukan agar Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara konstan bisa berada pada kisaran 6,5 – 7 Triliun.**

4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari; **1. Pajak Daerah**, yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)., Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. **2. Retribusi Daerah** yang terdiri dari Retribusi Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.** 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang Syah.

   Dari segala sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang paling besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari **Pajak Daerah** yang diproyeksikan sebesar **RP. 2,525 Trilyun** meski mengalami trend penurunan hampir diseluruh sektor dibanding tahun sebelumnya sebesar **Rp. 3,118 Trilyun**, terutama yang terbesar dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

   Melihat trend penurunan ini maka kami **Mohon penjelasan** dari Saudara Gubernur, menyangkut hal tersebut, berikut strategi apa yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan penghasilan daerah dari sektor Pajak Daerah ini wabil khusus sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Dipindai dengan CamScanner

5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi pemerintah dalam menyelenggarakan tupoksinya tentu didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas pemerintahan lainnya, adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui segala jenis aset infrastruktur milik pemerintah provinsi yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. Beberapa asset daerah yang seyogyanya bisa di optimalisasi fungsinya untuk dikonversi bisa menambah penghasilan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu melalui forum yang berbahagia ini kami **mohon penjelasan** mengenai beberapa hal tersebut diatas sekaligus agar di fasilitasi untuk di siapkan Laporan Neraca Aset Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejatinya adalah badan usaha yang didirikan oleh daerah untuk mampu menjadi penopang ekonomi daerah melalui kontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini sebagai pemegang saham BUMD tentunya telah menentukan target penghasilan masing-masing BUMD tersebut, dengan segala klausul yang disepakati bersama. Maka untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung permodalan masing-masing BUMD, agar pada gilirannya mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Fraksi Partai Demokrat **Mohon penjelasan Saudara Gubernur** terkait dengan eksistensi dan upaya penanganan BUMD milik Pemprov, terutama BUMD – BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD atau yang tidak sebanding dengan penyertaan modal. Menurut hemat Fraksi Partai Demokrat, perlu kebijakan yang jelas terhadap keberlanjutan BUMD tersebut, apakah di serahkan pengelolaan kepada pihak ketiga atau dilikuidasi saja.
7. Fraksi Partai Demokrat menyarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar lebih kreatif mencari sumber-sumber kegiatan baru secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

8. Fraksi Partai Demokrat menyarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar inpres percepatan penanganan perbaikan infrastruktur daerah pasca bencana di Sumatera Barat segera diatensi dan di realisasi.
9. Proyeksi penerimaan dari Pendapatan Transfer Daerah adalah sebesar Rp. 3.114 Trilyun. Dimana trend penerimaan Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan, untuk itu Fraksi Partai Demokrat **mohon penjelasan** yang lebih spesifik dari saudara Gubernur, dan sebaliknya Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar lebih gesit dan intensif dalam melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah pusat untuk percepatan Pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat terutama yang masih mangkrak dan padat modal agar pembiayaannya di biayai dari anggaran APBN untuk penghematan dan efisiensi APBD Provinsi Sumatera Barat.
10. Terakhir, kami Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada seluruh stage holder terutama seluruh instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar berlaku efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kegiatan terutama kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Billahitaufiq Wal-hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 4 November 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

DONI HARSIVA YANDRA, S.IP, M.E	**H. GINNO IRWAN**
Ketua	**Sekretaris**

Dipindai dengan CamScanner

ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

JEFFRI MASRUL, S.E.	HJ. AIDA, S.H.
BENNI SASWIN, S.E.	AGUS SYAHDEMAN, S.E.
HJ. YESI ENDRIANI, S.M.	ALI MUDA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Disampaikan Dalam :
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tanggal 4 November 2024

Dibacakan Oleh :
Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si

==========

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala Ombusdman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Kepemudaan serta Organisasi Profesi Provinsi Sumatera Barat

Yth. Rekan-rekan pers, undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dipindai dengan CamScanner

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat ***Allah Subhanahu wa ta'ala***, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada *Allah Subhanahu wa ta'ala*, semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita ***Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam***,

Selanjutnya, kami berterima kasih kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dan kami berterima kasih juga kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 yang lalu.

Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin yang kami hormat,

Ranperda APBD tahun 2025, selain tahun pertama dari pelaksanaan agenda RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045, dengan 7 misi RPJMD yang tetap dipertahankan sebagai prioritas pembangunan daerah tahun 2025, hal ini sebagai upaya menjaga kesinambungan RKPD dengan RPJMD. Namun pemerintah provinsi Sumatera Barat perlu juga mempersiapkan diri dengan adanya 48 kementerian serta sejumlah perubahan lainnya di era kepemimpinan baru Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran.

Dipindai dengan CamScanner

Kemudian, APBD harus memprioritaskan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah. Untuk pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi kebijakan pendapatan daerah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022.

Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin yang kami muliakan,

Setelah mendengarkan dan mencermati nota pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan dokumen Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, maka kami perlu memberikan beberapa catatan dan pertanyaan kepada Saudara Gubernur dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan demi tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi serta penguatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Adapun beberapa catatan dan pertanyaan yang berkenaan dengan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Terkait kebijakan anggaran pendapatan daerah, kami menilai paradigma penyusunan target pendapatan asli daerah tahun 2025 terlalu pesimistis, bahkan terkesan pemerintah provinsi enggan mengeksplorasi potensi-potensi baru sumber pendapatan asli daerah sumatera barat, hal ini

Dipindai dengan CamScanner

terlihat dari yang disampaikan oleh saudara gubernur, bahwa turun 14,10% dari tahun 2024.

2. Pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah diharapkan mempermudah proses pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi.
3. Walaupun pengelolaan kekayaan daerah disusun lebih optimis dengan kenaikan 15,54 %, akan tetapi proyeksi komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sejauh ini terhadap keseluruhan PAD masih relatif kecil.
4. Ada 8 poin yang menjadi dasar kebijakan belanja daerah ditahun 2025, namun masih menyisakan sebuah pertanyaan bagi kami, bahwa belanja operasi merupkan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, akan tetapi terjadi penurunan 7,80 % dari tahun anggaran 2024, termasuk belanja modal yang turun 50,21 %, mohon Saudara Gubernur memperjelas rencana dari penurunan tersebut yang terdiri dari 5 poin belanja ?
5. Terkait Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah, pada pos pengeluaran pembiayaan, pada tahun anggaran 2025 pemerintah daerah mengalokasikan penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari sama dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 20.000.000.000. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar oleh Saudara gubernur untuk mengalokasikan penyertaan modal Tahun Anggaran 2025 sama dengan tahun anggaran 2024 ?
6. Pada perubahan APBD tahun 2024 masih belum sepenuhnya alokasi anggaran program/kegiatan tertampung, maka kami sangat berharap dapat ditampung dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025.
7. Kemudian kami mengingatkan kepada OPD untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan saat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur, Anggota DPRD yang kami hormati,

Pada kesempatan Rapat Paripurna yang terhormat ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan perlu juga menyampaikan catatan dan pertanyaan yang kami rangkum dari reses dan kunjungan terkait fungsi pengawasan. Catatan dan pertanyaan kami perlu dicarikan solusi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk keharmonisan dan kemitraan, sebagai berikut :

1. Kota Sawahlunto adalah sebuah kota dari Provinsi Sumatera Barat, kota yang mana pernah mendapatan penghargaan warisan budaya dunia yang diberikan oleh UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 di Azarbaijan, yaitu ***Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto*** (WTBOS) atau dikenal ***Ombilin Coal Mining Haritage of Sawahlunto*** (OCMHS). Penghargaan tersebut adalah yang ke 5 setelah Candi Borobudur (1991), Candi Prambanan (1991), Situs Sangiran (1996), sistem Subak di Bali (2012). Ada 7 (tujuh) daerah terikat dalam warisan budaya Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto, selain kota Sawahlunto juga termasuk Kabupaten Solok, kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman dan kota Padang.

   Sampai tahun ini, sudah 5 (lima) tahun penghargaan diberikan Unesco kepada kita, akan tetapi perhatian Pemerintah Propinsi masih jauh dari harapan. Kota Sawahlunto sebagai Zona A atau Zona Inti dari Warisan dunia ini, perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Bidang Sarana Prasarana, kami melihat jalan *Propinsi mulai dari Guguk Cino sampai ke Pusat Kota Sawahlunto dibutuhkan pelebaran dan Peningkatan*, agar wisatawan yang mempergunakan bus pariwisata tidak takut lagi masuk ke area wisata

Dipindai dengan CamScanner

Sawahlunto, karena kondisi jalan yang ada sangat sempit dan jelek serta berlobang.

Disamping itu, untuk menuju ke Kota Sawahlunto dengan jalan Nasional yang ada saat ini sangat sempit berkelok kelok serta rawan kecelakaan, Pemerintah Kota Sawahlunto sudah berusaha memperpendek jalan nasional mulai dari Muaro Kalaban - Sawahlunto dengan membuka Badan Jalan Baru sepanjang lebih kurang 2 Km akan tetapi untuk pengerasan dan pembangunan serta sarana prasarana lainnya, Pemerintah kota tidak mampu dikarenakan keterbatasan APBD. Bila mana jalan ini ditingkatkan maka arus Lalulintas Muaro kalaban Sawahlunto menjadi Lancar dan amanan bagi wisatawan menuju pusat kota Sawahlunto.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam sidang paripurna terhormat, kami minta pemerintah provinsi melakukan pembenahan administrasi dan peningkatan alokasi anggaran untuk sarana prasarana di *Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto.* Mohon tanggapan Saudara Gubernur ?

2. Kita mengetahui bahwa Kabupaten Tanah Datar sebagian besar masyarakatnya adalah bertani. Tetapi kami melihat di salah satu Nagari, irigasi yang dibangun oleh Belanda yang berusia ±100 tahun, belum mendapatkan perbaikan yang memadai dari Pemerintah Propinsi. Kami berharap Irigasi tersebut, yang ada di Kecamatan *Padang Ganting, mulai dari Kepalo Bandar Jorong Rajo Dani* yang melewati *jorong koto Gadang* dan *Koto gadang hilir* dapat diperbaiki. Tentu harapan kami dapat ditampung dalam tahun anggaran 2025, sekiranya tidak ada ruang di tahun anggaran 2025, maka kami

Dipindai dengan CamScanner

berharap pada Tahun Anggaran 2026. Mohon tanggapan Saudara Gubernur ?

3. Dalam beberapa kunjungan kelapangan, kami melihat masih banyak aset pemerintah provinsi Sumatera Barat yang belum terkelola dengan maksimal, untuk itu kami minta pemerintah provinsi agar meningkatkan perhatian dan serius mengelola aset-aset yang bertebaran di seluruh Kota dan Kabupaten, diantaranya asset-aset yang ada di pertanian bukittinggi. jika asset tersebut dikelola dengan maksimal tentu dapat menambah Pendapatan Asli Daerah. Kami menyarankan apabila diperbolehkan, oleh peraturan perundang-undangan sebaiknya dipihak ke-tiga-kan saja agar terkelola dengan baik.
4. Kami berharapan pemerintah bergerak cepat untuk menyelesaikan jalan *payakumbuh setangkai* yang tidak layak tempuh lagi. Jalan ini sudah viral dimedia social, jalan ini sering disebut dengan *jalan wisata seribu lobang* dan *kabut*. Kami kuatir debu jalan yang tiap hari di hirup masyarakat disepanjang jalan payakumbuh setangkai akan menimbulkan persoalan baru, terutama yaitu penyakit sesak nafas. Mohon tanggapan Saudara Gubernur ?
5. Berkenaan dengan pola hubungan kemitraan Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggaraan pemerintahan agar saling mendukung dan bekerjasama dengan baik, sehingga pokok-pokok pikiran Gubernur dan DPRD benar-benar sepenuhnya terjawab seluruh kebutuhan dan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur, Anggota DPRD yang kami hormati,

Demikianlah Pandangan Umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf, manakala ada hal-hal yang tidak berkenan bagi para pihak.

wabillahi taufiq wal hidayah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Padang, 04 November 2024

Ir.Hj. Neldaswenti, M.Si
Juru Bicara

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

S A W A L, SH
KETUA

Ir.Hj. NELDASWENTI, M.Si
SEKRETARIS

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

1. **TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**
2. **TENTANG PROPEMPERDA TAHUN 2025**
3. **TENTANG RENJA DPRD TAHUN 2025 DAN RENJA DPRD 5 (LIMA) TAHUNAN 2024-2029**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/Kepala di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Para Wartawan, undangan serta hadirin yang berbahagia.

Hadirin yang kami muliakan,

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan

Dipindai dengan CamScanner

Pendapat Akhir terhadap tiga Ranperda di atas , dan seizin Pimpinan Rapat ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena dengan seizin-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Kerja Pembahsan Akhir hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, serta mari kita sampaikan juga shalawat dan salam kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan-minazzulumati ilannur sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Hadirin yang kami muliakan,

Sebelum kami membacakan pandangan akhir Fraksi kami ini, izinkan terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan :

> *Besok tanggal 27 November 2024 adalah hari dimana kita menentukan pilihan untuk Pimpinan Daerah (Pilkada) se Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat khususnya, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengajak kita untuk dapat kiranya kita bersama-sama menjaga keharmonisan agar Sumatera Barat yang kita cintai ini selalu damai ; '* ***PEMILU ADALAH PANGGUNG DEMOKRASI DIMANA KITA SEMUA MEMILIKI SUARA, MARI GUNAKAN HAK KITA DENGAN BIJAKSANA DAN HORMATI PILIHAN ORANG LAIN'***

Terimakasih kepada rekan-rekan Badan Anggaran bersama TAPD yang telah maksimal melakukan pembahasan sehingga Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang diberikan dan juga ucapan terimakasih Fraksi kami sampaikan kepada Tim Pembahasan Propemperda, Tim Pembahasan Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan 2024-2029 atas kerja Tim sehingga hari ini dapat kita laksanakan kegiatan untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi kita masing-

Dipindai dengan CamScanner

masing sebagai akhir dari prosesnya. Selanjutnya izinkanlah kami membacakan pandangan akhir Fraksi kami sebagai berikut :

1. RANPERDA TENTANG APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025.

APBD Tahun 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah beberapa waktu yang lalu dan telah melalui pembahasan yang serius antara Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat (Banggar) dapat tergambarkan garis besar kinerja pemerintah selama satu tahun terhadap perencanaan, program dan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun 2025. Apakah anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan satu tahun dan direlaisasikan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Sumatera Barat, hasil proses terebut dituangkan dalam satu peraturan daerah (perda) yang saat ini sedang berlangsung tahap akhir, izinlah Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyapaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1. Setelah membaca laporan Banggar bersama TAPD terkait PAD dimana terjadi beberapa koreksi untuk meningkatnya, maka Fraksi PDI perjuangan dan PKB meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar-benar dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Rapat Banggar bersama TAPD yang sudah tercantum dalam laporan. Fraksi kami juga menekankan agar kinerja OPD terkait lebih terukur, karna PAD sangatlah singnifikan pengaruhnya dalam postur APBD.

2. Sekaitan dengan poin satu di atas Fraksi kami menyikapi laporan terhadap Pendapatan Daerah yang ditargetkan *sebesar Rp. 5.658.065.098.875,- jauh dibawah target RPJMD yaitu sebesar Rp. 7.611.087.610.000,- dan target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 6.586.576.217.900,-*, dimana untuk melakukan peningkatannya selalu terkonsentrasi pada pajak dan retribusi daerah, menurut Fraksi kami

Dipindai dengan CamScanner

seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah dapat melakukan peningkatan nilai PAD tidak terfokus pada pajak dan retribusi saja tetapi semua sektor PAD harus dapat ditingkatkan, kenapan hal ini kami sampaikan, karena sektor pajak ini terkesan dalam pembuatan rencananya dilakukan dengan angka minimal dan apa bila terjadi persoalan pada pendapatan maka PAD dapat dikoreksi untuk ditingkatakan, kedepan hal ini dapat dihindari.

3. Pada sektor Belanja Daerah, sebagaimana yang Fraksi kami sampaikan pada Pandangan Umum yang lalu bahwa Belanja Modal sangat penting untuk Pembangunan Daerah Sumatera Barat agar perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sependapat dengan laporan Banggar bersama TAP bahwa alokasi belanja modal yang semula disediakan sebesar Rp. 389.747.773.595,- bertambah sebesar Rp. 187.894.553.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 577.642.326.595,-. *Meskipun terjadi peningkatan belanja modal, namun alokasinya masih jauh dari alokasi yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 14 % dari total belanja dan masih jauh dari upaya untuk memenuhi alokasi belanja modal infrastruktur pelayanan publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 40 % dari total alokasi belanja daerah.* Sekaitan dengan hal ini Fraksi kami menyampaikan bahwa pada posisi belanja modal ini pemerintah daerah seharusnya sudah dapat melakukan kajian dalam menggali untuk meningkatkan anggaran karena beberapa tanggung jawab/kewenangan provinsi yang berada di Kabupaten/Kota terutama masalah jalan hingga saat ini belum mendapatkan solusi diantanranya ruas jalan di Kabuapten Dharmasraya yaitu ruas jalan Simpang Sikabau - Simpang Koto Baru sepanjang 29 km mengalami kerusakan dibeberapa titik, sehingga menyebabkan akses dan mobilitas menjadi

Dipindai dengan CamScanner

terhambat dan tidak lancar, saran Fraksi kami persoalan ini menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Masih pada posisi belanja modal diama salah satu catatan dari Banggar; *Untuk alokasi belanja modal, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah untuk konsisten secara terus menerus meningkatkan alokasi belanja modal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam upaya percepatan Pembangunan Daerah dan mengejar ketertinggalan dengan provinsi tetangga.* Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan pengingatan saja agar UU No 1 Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2027 mendatang maka perlu di lakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah. Peningkatan kapasitas SDM ini perlu di lakukan.

5. Terkait dengan pelaksanaan APBD Tahun 2025, Fraksi kami meminta masing-masing OPD agar dapat melaksanakan program kerja secara maksimal, dengan PAGU anggaran yang telah ditetapkan di APBD Tahun Anggaran 2025 ini serta perlu pengawasan internal, agar program pembangunan berjalan dengan baik. Fraksi kami juga menekankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di tahun mendatang, serta menciptakan potensi ekonomi baru, meningkatkan ekonomi biru dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat, dan juga yang berkenaan dengan berbagai program pembangunan, diharapkan kualitas dari proyek infrastruktur bisa lebih baik, agar masyarakat dapat memperoleh manfaatnya."Pergunakan anggaran secara efektif dan efisien," dan diharapkan pula, seluruh pelaksana kegiatan APBD

Dipindai dengan CamScanner

harus taat hukum, kaji lagi sistem pengendalian yang lebih efektif di setiap proyek sehingga tidak melakukan tindakan korupsi.

6. Fraksi kami mengingatkan akan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada tahun yang lalu, penerapan sistem digitalisasi ini harus segera dilakukan di berbagai sektor, terutama dalam hal penerimaan dan belanja daerah, agar transparansi dan efisiensi dapat tercapai lebih optimal.

7. Diharapkan OPD-OPD mampu menampung kegiatan-kegiatan yang di usulkan oleh anggota DPRD, yang sudah ditatapkan dalam APBD Tahun 2025 ini meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksi akan dinamis.

2. TENTANG PROPEMPERDA TAHUN 2025

Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan. Dan berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam penyususnan Propemperda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Gubernur serta Pasal 15 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yaitu pemilihan usulan ranperda yang akan dimasukkan dalam Propemperda harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah,

Dipindai dengan CamScanner

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah.

Setelah melalui rangkaian pembahasan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1) Tentang ditetapkannya sebanyak 13 (tiga belas) usulan Ranperda dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 7 (tujuh) Ranperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah dua 20 (dua puluh) Ranperda yang akan dituangkan dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Sekaitan dengan hal ini Fraksi kami mengajak kita semua untuk dapat kiranya melakukan evaluasi terhadap jumlah Propemperda tahun 2025 yang menurut Fraksi kami cukup banyak, dan Fraksi kami menyarankan mari kita pilah kembali Propemperda ini mana yang menjadi skala perioritas untuk tahun 2025 nanti.

2) Seandainya usulan Fraksi kami pada poin satu di atas diterima/tidak diterima Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dapat menerima Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini menjadi keputusan dan dilaksanakan sebaik-baiknya serta mendorong Bapemperda untuk dapat kiranya mendorong Komisi-komisi/Pansus yang ditugaskan membahas Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda untuk dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan termasuk melakukan sosialisasi Ranperda yang telah menjadi Perda kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui dan memahami.

Dipindai dengan CamScanner

3. **TENTANG RENCANA KERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 DAN RENCANA KERJA DPRD 5 (LIMA) TAHUNAN**

A. **Tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

Dalam pasal 95 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur peneyelenggaran pemerintahan daerah/mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah darah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efesiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana dibunyikan dalam pendahuluan laporan pembahasan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sebagaimana yang disampaikan UU No 23 Tahun 2014 pasal 95 ayat (1) diatas maka dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi, tugas, hak dan kewenangan yang strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya pembahasan rancangan perda, pembahasan anggaran dan pengawasan serta tugas-tugas konstitusional lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Bamus, maka Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengharapkan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini medapat dukungan penuh oleh Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Fraksi PDI Perjuagan dan PKB dapat menerima Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini menjadi sebuah keputusan sehingga dokumen Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan/pedoman

Dipindai dengan CamScanner

dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai anggota DPRD. Terakhir terimakasih pada kawan-kawan Bamus yang telah merampungkan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini.

B. **Rencana Kerja DPRD 5 (Lima) Tahunan 2024-2029**

Setelah membaca rancangan Renja DPRD lima tahunan 2024-2029 yang merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran dan capaian target kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, hak dan kewenangan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, izinkan Fraksi PDI perjuangan dan PKB menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari hasil Evaluasi Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 20219-2024, bahwa dalam *pelaksanaan kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, terdapat cukup banyak kelemahan - kelemahan, diantaranya: Masih banyak ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang belum mencerminkan kebutuhan masyarakat atau Ranperda yang sangat prioritas.* Sekaitan dengan hasil evaluasi ini maka kedepan Fraksi kami berharap agar kita selektif dalam pembahasan Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan Ranperda-ranperda diusulkan dapat memberikan manfaat oleh masyarakat Sumatera Barat.
2. Untuk target kinerja lima tahunan yang akan dicapai dari kegiatan Pembahasan Perda selama periodesasi masa jabatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029, adalah: 1) Disusunnya sebanyak 25 Ranperda Usul Prakarsa DPRD 1 (satu) Ranperda setiap Komisi selama 5 Tahun. 2). Disusunnya Propemperda Provinsi Sumatera Barat (Propemperda Tahun 2025, Tahun 2026, Tahun 2027,Tahun 2028 dan Tahun 2029), 3). Dibahasnya dan disepakatinya

Dipindai dengan CamScanner

sebanyak 75 Ranperda (15 Ranperda/Tahun), 4). Disepakatinya Ranperda tentang APBD dan Perubahan APBD tepat waktu. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyarankan jumlah Ranperda yang akan kita bahas pertahun mohon dikurangi sebagaimana yang kami sampaikan dalam pendapat di Propemperda.

Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, dan para hadirin yang berbahagia.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Propemperda Tahun 2025, Renja DPRD Tahunan dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan ini kami sampaikan, selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dapat menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, Propemperda Tahun 2025 , Renja DPRD Tahunan (2025) dan Renja DPRD lima (5) Tahunan 2024-2029 untuk di sahkan dengan segala harapan yang kami sampaikan di atas agar menjadi perhatian dikemudian hari oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bagi kita dalam menjalankan Fungsi serta kewajiban kita. Atas segala perhatian Rapat Kerja ini kami ucapkan terimaksih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 26 November 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman, SE	**Donizar**
Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TERHADAP

1. Ranperda APBD Tahun 2025
2. Propemperda Tahun 2025
3. Renja DPRD Tahun 2025, dan Renja DPRD 5 (lima) Tahun

Disampaikan Dalam :

Rapat Kerja Pembahasan Akhir
Selasa / 26 November 2024

==========

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Saudara Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat ***Allah Subhanahu wa ta'ala***, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Kerja

Dipindai dengan CamScanner

Pembahasan Akhir ini dalam keadaan sehat wal'afiat, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Shalawat beserta salam kita kirimkan untuk Nabi besar ***Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam***, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada kita untuk kebahagian di dunia dan akhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnahnya.

Selanjutnya, melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir** Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan Renja DPRD Tahun 2025 serta Renja DPRD 5 (lima) tahunan***

Pimpinan Rapat, Anggota Dewan yang kami hormati,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Mitra Kerja dalam hal ini OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat, yang sudah melakukan pembahasan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, dan apresiasi kami sampaikan juga kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Sumatera Barat, dimana telah mempertajam pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025 dengan menerima saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD.

Dipindai dengan CamScanner

Teruntuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang telah melakukan pembahasan Propemperda Tahun 2025, Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan, tentu kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya.

Pimpinan Rapat, Hadirin yang kami hormati,

Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah melalui mekanisme yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rancangan Peraturan Daerah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menentukan arah kebijakan dari semua sektor pembangunan serta fasilitas pendukung lainnya, termasuk Propemperda Tahun 2025. Propemperda merupakan cikal bakal Peraturan Daerah dalam satu tahun anggaran yang berisi konsepsi ranperda berdasarkan skala prioritas. Dengan adanya Propemperda diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai target. Namun target kinerja yang akan kita lakukan, tidak bisa dilepaskan dengan adanya Rencana Kerja (Renja) DPRD yang berfungsi sebagai pedoman dan landasan yuridis bagi anggota dan pimpinan DPRD dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan tugas kedewanan.

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum kami menyampaikan substansi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, Propemperda 2025 dan Renja DPRD 2025 serta Renja DPRD 5 (lima) Tahunan, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dirasa perlu menyampaikan beberapa pendapat dan saran sebagai berikut :

1. Ranperda APBD Tahun 2025

Proses penyusunan APBD Tahun 2025 bukan sekedar naik turun nilai anggaran, akan tetapi pencapaian-pencapaian pada periode sebelumnya, serta memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan difisit atau surflus anggaran. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan, sebagai berikut :

a) Makro ekonomi daerah Tahun 2025 yang dijadikan asumsi dalam penyusunan APBD Tahun 2025, sebagian besar masih di bawah rata-rata nasional. Dengan asumsi tersebut, maka provinsi Sumatera Barat akan semakin tertinggal dari provinsi tetangga yang semakin maju dan semakin berkembang. Ini menjukan ada yang salah dalam kebijakan dan arah pembangunan daerah. Untuk itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih progresif dan mengoptimalkan semua potensi sumber daya untuk mempercepat gerak Pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

b) Target pendapatan dan alokasi belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2025 masih jauh dari kebutuhan untuk mewujudkan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan target base line RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Dengan kondisi tersebut, tentu akan berdampak terhadap capaian target kinerja Pembangunan daerah dan apalagi tahun 2025 merupakan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, masa jabatan Tahun 2021-2025. Oleh sebab itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025 dan tidak adalagi alasan-alasan dari Kepala OPD yang tidak sanggung melaksanakannya. Apabila Kepala OPD tidak sanggup melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025, maka sebaiknya yang bersangkutan di ganti dengan pejabat lain yang lebih progresif.

c) Kinerja pengelolaan pendapatan daerah terutama dari sektor PAD yang terdapat dalam APBD Tahun 2025, masih jauh dari harapan. Masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap dengan maksimal, seperti pada objek PKB, BBNKB, PAB, PAP. Demikian juga dengan pemanfaatan asset daerah, baik yang dikelola sendiri maupun yang

Dipindai dengan CamScanner

dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Untuk itu, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisasi aparat yang terkait dalam pengelolaan PAD dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selanjutnya diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan up date data objek PKB dan meninjau Kerjasama pemanfaatan asset daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan PKB.

d) Dari hasil finalisasi pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025, disepakati komposisi struktur anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah	**Rp.**	**6,269,132,092,948.00**
a. PAD	Rp.	2,827,388,541,948.00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	3,423,868,351,000.00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	17,875,200,000.00
2.Belanja Daerah	**Rp.**	**6,433,050,092,948.00**
a. Belanja Operasional	Rp.	4,410,946,239,890.00
b. Belanja Modal	Rp.	577,642,326,595.00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	26,974,070,362.00
d. Belanja Transfer	Rp.	891,337,199,489.00
3.Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	194,918,000,000.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	31,000,000,000.00

Dipindai dengan CamScanner

2. Propemperda Tahun 2025

Peraturan Daerah Provinsi adalah produk hukum regional ditingkat Provinsi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan bersama dengan DPRD, yang pembentukannya dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan perundangan. Sebagimana Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta serta mempedomani permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah, dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dilingkungan pemerintah Daerah Kepada Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) melalui pimpinan DPRD.

Setelah mencermati dokumen propemperda, terdapat 20 ranperda ditahun 2025, maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyakini apa-apa yang sudah dibahas oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah memenuhi unsur dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan hukum didaerah dan berjalan selaras dengan sistem hukum nasional.

Dipindai dengan CamScanner

3. Renja DPRD Tahun 2025, dan Renja DPRD 5 (lima) Tahun

Renja DPRD merupakan dokumen perencanaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, dan aspiriasi masyarakat. Renja DPRD sendiri merupakan bagian dari rangkaian system perencanaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, sekaligus tahap awal implementasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045.

Maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengajak kita semua, bahwa Rencana Kerja (Renja) DPRD yang akan ditetapkan dalam keputusan DPRD nantinya, diharapkan secara bersama-sama, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berpedoman kepada Renja DPRD, karena merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana strategis, target kinerja, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah lainnya yang melibatkan seluruh elemen, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pimpinan Rapat hadirin yang kami hormati,

Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan ini ***Menyetujui*** *Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, untuk* ***ditetapkan*** *menjadi* ***Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.***

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ***Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan Renja DPRD Tahun 2025 serta Renja DPRD 5 (lima) tahunan,*** untuk ditetapkan menjadi **Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat.**

Pimpinan Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormat,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami sebagai juru bicara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, manakala ada hal-hal yang tidak berkenan bagi para pihak.

wabillahi taufiq wal hidayah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
JURU BICARA

H. DASWIPPETRA DT.MANJINJIANG ALAM, SE,M.Si

S A W A L, SH	**Ir.Hj. NELDASWENTI, M.Si**
KETUA	**SEKRETARIS**

F - PPP/9

Dipindai dengan CamScanner

PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI

DEMOKRATDPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE 2024 – 2029

TERHADAP

1. **RANPERDA APBD TAHUN 2025**
2. **PROPEMPERDA TAHUN 2025**
3. **RENJA DPRD TAHUN 2025 DAN RENJA DPRD 5 (LIMA) TAHUNAN**

DISAMPAIKAN OLEH : JEFRI MASRUL. SE

DALAM

RAPAT KERJA PEMBAHASAN AKHIR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL, 26 NOVEMBER 2024

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat

DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2024 – 2029

Terhadap

1. **Ranperda APBD Tahun 2025**
2. **Propemperda Tahun 2025**
3. **Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan**

Tanggal, 26 November 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr Wb, Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati; Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Saudara Sekretaris Daerah, Staff Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran Aparatur Sipil Negara yang telah membersamai kita semua dalam pembahasan program kegiatan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Kerja Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan

Sembari mengharap Rahmat dan RidhaNya, dalam kesempatan pertama ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wat 'ala*, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, kita dapat hadir untuk saling bersilaturrahmi dan saling berintegrasi dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap **Ranperda APBD Tahun 2025, Propemperda Tahun 2025, Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan**, Aamiin Yaa Rabbal Alamiiin.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan sebesar besarnya kepada sosok pembaharu dunia, junjungan Islam Nabiyullah Muhammad Salalallahu Hu A'laihi Wassalam, yang telah berjasa besar bagi kemajuan peradaban dunia selayaknya yang kita sama-sama rasakan di saat ini.

Wabil khusus kepada Saudara Pimpinan Rapat, kami mengucapkan terimakasih atas diberikannya kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Sebagai penyelenggara pemerintahan dan regulator daerah Provinsi Sumatera Barat, Saudara Gubernur telah menyampaikan Penjelasan dan tanggapan Gubernur Sumatera Barat mengenai **Ranperda APBD Tahun 2025.** Disamping itu pada kesempatan yang berbeda kita juga sudah melakukan pembahasan terhadap **Propemperda Tahun 2025, berikut juga Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan**, maka sudah selayaknya bagi Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan materi-materi sebagaimana diatas.
Menanggapi Penjelasan dan tanggapan saudara Gubernur Sumatera Barat terhadap **Ranperda APBD Tahun 2025, Propemperda Tahun 2025, berikut juga Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan**, maka setelah melihat, mendengar, membaca, mempelajari dan menelaah dari setiap materi pembahasan, menyangkut hal-hal sebagaimana diatas, izinkanlah Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pendapat Akhir yang disajikan dalam satu paket penyajian pendapat akhir dengan sistematika sebagai berikut :

I. **Ranperda APBD Tahun 2025**
   Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, memiliki arti penting dan bernilai strategis dalam pembangunan daerah Sumatera Barat. RAPBD juga menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Visi-Misi pembangunan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam penjelasannya saudara Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 akan diarahkan serta di fokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola pemerintahan sebagai Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target Pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai tepat waktu dengan pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas Pembangunan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam RKPD Tahun 2025.

Fraksi Partai Demokrat merespons positif terkait cita-cita RAPBD tahun 2025 ke depan yang akan diarahkan untuk melaksanakan Pembangunan dengan tema **Pembangunan tahun 2025 yaitu Yaitu Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Ingklusif Dan Berkelanjutan.**

Tema ini dimaknai sebagai Pembangunan yang dilaksanakan untuk mengakselerasi produktivitas sektor strategis ekonomi, pertanian, perdagangan dan pariwisata serta pembangunan yang dilaksanakan secara ingklusif dan berkelanjutan melalui penguatan fundamental perekonomian daerah, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan serta memastikan seluruh Masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap pelayanan dasar minimal.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur Pembangunan sebagaimana tema **Pembangunan tahun 2025 diatas**, Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap konsisten dengan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, yang akan dijalankan dengan tetap mempertimbangkan dinamika isu strategis, RPJPN 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045. Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mampu menjaga konsistensi pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka Panjang.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Dipindai dengan CamScanner

RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah, untuk itu Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mampu menjaga konsistensi pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap berpedoman pada dokumen tersebut.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025 harus mencerminkan kebutuhan real masyarakat dengan mengutamakan penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan memprioritaskan program untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, maka disepakati komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar **Rp. 6,269,132,092,948,-** (*Enam Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), dan **besaran belanja daerah** sebesar **RP. 6,433,050,092,948,-** *(Enam Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)*, dari proyeksi sebagaimana diatas maka diprediksi Sumatera Barat akan mengalami inflasi sebesar Rp. **163.918.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) pada Tahun Anggaran 2025.**

Berikut komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebegai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.6.269.132.092.948,-
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 2.827.388.541.948,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 3.423.868.351.000,-
c. Lain-Lain PAD Yg sah	Rp. 17.875.200.000,-
2. Belanja Daerah	Rp. 6.433.050.092.98,-
a. Belanja Operasi	Rp. 4.410.946.239.890,-
b. Belanja Modal	Rp. 577.642.326.595-
c. Belanja Tidak Terduga (BTT)	Rp. 26.974.070./362,-
d. Belanja Transfer	Rp. 891.337.199.489,-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 194.100.970.842,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 31.000.000.000,-

Dipindai dengan CamScanner

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan realitas Proyeksi Pendapatan Daerah dan besaran Belanja Daerah Tahun 2025 Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat menyadari dengan sesungguhnya dinamika ekonomi yang terus mengalami turbulensi akan berakibat kurang bagus bagi pertumbuhan ekonomi daerah, maka dari itu kami memandang perlu untuk mengingatkan saudara Gubernur beserta jajaran eksekutif agar lebih kreatif mencari sumber-sumber kegiatan baru secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat, yang pada gilirannya akan mampu untuk mengcover seluruh kebutuhan daerah Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan tema misi **pembangunan tahun 2025** yang mampu mengakselerasi produktivitas sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang ingklusif dan berkelanjutan.

Pada era yang serba maju seperti sekarang, Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif, yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memastikan agar pendidikan di Provinsi Sumatera Barat lebih berkualitas dan merata. Bagaimana pun, sejumlah tantangan masih dihadapi di Provinsi Sumatera Barat , di mana aksesibilitas pendidikan belum merata, masih terdapat wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri (*blank spot* area pendidikan negeri). Selain itu, diketahui bersama dalam beberapa tahun terakhir Provinsi Sumatera Barat menghadapi masalah masih kurangnya jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi atau memiliki sertifikasi. Dimana, Pada saat bersamaan, banyak tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun, di mana jumlahnya tidak dapat ditutupi dengan jumlah penambahan guru baru.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diatasi adalah angka putus sekolah yang masih terjadi.

Dipindai dengan CamScanner

Masih berkaitan dengan persoalan Sumber Daya Manusia. Saat ini kita masih berhadapan dengan persoalan *stunting*. Meskipun semakin turun tiap tahunnya, namun angka prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat masih cukup tinggi. Ini menunjukkan pemenuhan gizi masyarakat masih kurang.

Catatan Fraksi Partai Demokrat yang terakhir adalah menyangkut tata kelola pemerintahan. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar terus mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik berbasis digital. Dalam jangka panjang, penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah keniscayaan. Dalam hemat Fraksi Partai Demokrat, sistem pelayanan publik yang terintegrasi akan membuat kinerja pemerintah meningkat dan mampu memuaskan warga Masyarakat.

Akhirnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah melalui pembahasan yang alot dan dinamis, dengan senantiasa berharap Rahmat dan bimbingan dari Allah, Tuhan Yang Masa Esa, Fraksi Partai Demokrat **SETUJU** dan **MEREKOMENDASI** untuk ditetapkannya **Ranperda APBD Tahun 2025** menjadi **APBD Tahun 2025** sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

II. Propemperda Tahun 2025

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, untuk mewujudkan kepastian hukum yang berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya dalam pembentukan peraturan daerah mesti disusun terlebih dahulu melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda).

Propemperda merupakan amanat undang-undang sebagaimana ketentuan *pasal 239 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya disebutkan bahwa perencanaan, penyusunan perda yang dilakukan dalam program pembentukan perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.*

Dipindai dengan CamScanner

Penyusunan propemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda, baik usulan yang disampaikan oleh pihak eksekutif maupun usulan yang di inisiasi oleh anggota legislatif. Dimana berdasarkan inventarisasi usulan Raperda yang diterima Bapemperda, keseluruhannya adalah menyangkut hal-hal yang sangat urgen bagi kemajuan Pembangunan Sumatera Barat kedepan. Diantaranya adalah;

NO.	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KOMISI	PENDAPAT FRAKSI
1.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	PEMDA	I	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
2.	Penyelenggaraan Penyiaran Di Daerah	DPRD	I	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
3.	Penyelenggaraan KetenagakerJaan.	PEMDA	II	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
4.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPRD	II	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
5.	Ranperda tentang Pengelolaan Mangrove.	DPRD	II	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	PEMDA	III	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan

Dipindai dengan CamScanner

7.	Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha.	PEMDA	III	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perseroan Terbatas.	PEMDA	III	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
9.	Jasa Konstmksi	PEMDA	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
10.	Penyelenggaraan Jalan.	PEMDA	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
11.	Penbahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman Tahun 2016-2035.	PEMDA	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
12.	Rencana Tata Ruang Wilayah	PEMDA	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
13.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sepadan Danau dan Sungai	DPRD	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan

Dipindai dengan CamScanner

14.	Pengelolaan Pesantren.	DPRD	V	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
15.	Perubahan Atas Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	DPRD	V	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
16.	Pelayanan Mutu Kesehatan	DPRD	V	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
17.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	PEMDA	Banggar	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
18.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	PEMDA	Banggar	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
19.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	PEMDA	Banggar	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
20.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.	PEMDA	Pansus	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan

Dari 20 (Dua Puluh) Raperda yang diusulkan tersebut, setelah, melihat, mempelajari, menganalisis dan berdiskusi, akhirnya Fraksi Demokrat Provinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk menetapkan keseluruhan Raperda yang di usulkan agar dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan darah Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

III. Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahunan

Setelah memperhatikan dan memahami draft program, kegiatan dan indikator serta target capaian kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, yang terdiri atas *40 halaman*, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahunan **telah sejalan** dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ***Pemerintahan Daerah*** yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Bersama Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Kerja DPRD (Renja DPRD) bertujuan untuk menjadi pedoman terstruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui Renja ini, program dan kegiatan DPRD diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, seperti RPJMD, sehingga kegiatan DPRD dapat mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah secara optimal. Renja juga memastikan pengalokasian anggaran yang transparan dan efisien, memfokuskan kegiatan DPRD pada prioritas yang berdampak nyata bagi Masyarakat.

DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pemerintah daerah berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di daerah berdasarkan program yang telah disusun bersama yang dituangkan pada Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025-2045, Perda RPJMD 2025-2030 dan Nota kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS APBD tahun Anggaran 2025, sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2024 – 2029 Terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, Propemperda Tahun 2025, Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Billahitaufiq Wal-hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 26 November 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

DONI HARSIVA YANDRA, S.IP, M.E	**H. GINNO IRWAN**
Ketua	**Sekretaris**

ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

JEFFRI MASRUL, S.E.	HJ. AIDA, S.H.
BENNI SASWIN, S.E.	AGUS SYAHDEMAN, S.E.
HJ. YESI ENDRIANI, S.M.	ALI MUDA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 31/SB/2024

Tentang

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUAMTERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 31/SB/2024

Tentang

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUAMTERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

Padang, 28 November 2024

Nomor : 165/ /661 /FPP-DPRD/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Perda.

Kepada Yth:
Sdr. Gubernur Sumatera Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 November 2024, bersama ini kami kirimkan berkas kelengkapannya sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun 2025.
2. Berita Acara Persetujuan Bersama.
3. Risalah Rapat Paripurna.`
4. Laporan Pembahasan Badan Anggaran.
5. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi .

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

Drs. H. MUHIDI, MM

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 31/SB/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna tanggal 1 November 2024;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan :

1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 26 November 2024;
2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 November 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 berjumlah sebesar **Rp 6.469.050.092.948,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.274.132.092.948,00
2. Belanja Daerah	Rp.	6.438.050.092.948,00
Surplus/Defisit	Rp.	(163.918.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	194.918.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	31.000.000.000,00
A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.832.388.541.948,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	3.423.868.351.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	17.875.200.000,00

1.1. Pendapatan Asli Daerah			
a. Pajak Daerah	Rp.	2.114.428.147.371,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	418.152.450.667,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	144.997.550.509,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	154.810.393.401,00
2.1. Pendapatan Transfer		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	3.423.868.351.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Pendapatan Hibah	Rp.	17.875.200.000,00
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	**Rp.**	**4.720.706.007.080,45**
1.1 Belanja Pegawai	Rp.	2.644.850.645.405,95
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.991.134.032.490,50
1.3 Belanja Subsidi	Rp.	6.500.000.000,00
1.4 Belanja Hibah	Rp.	78.221.329.184,00
2. Belanja Modal	**Rp.**	**792.711.736.536,50**
2.1 Belanja Modal Tanah	Rp.	16.849.634.001,00
2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	192.554.635.706,50
2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	167.915.009.521,00
2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	413.830.046.308,00
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.562.411.000,00
2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	-
3. Belanja Tidak Terduga	**Rp.**	**33.295.149.842,00**
Belanja Tidak Terduga	Rp.	33.295.149.842,00
4. Belanja Transfer	**Rp.**	**891.337.199.489,00**
4.1 Belanja Bagi Hasil	Rp.	860.837.199.489,00
4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	30.500.000.000,00
C. Pembiayaan Daerah terdiri dari :		
1. Penerimaan Pembiayaan	**Rp.**	**194.918.000.000,00**
SILPA	Rp.	194.918.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	**Rp.**	**31.000.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah - Bank Nagari	Rp.	31.000.000.000,00

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

MUHIDI

BERITA ACARA

Nomor : 120-162/GSB-2024
Nomor : 120-13-2024

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
   Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : MUHIDI
      Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

   b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

   c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

   d. Nama : NANDA SATRIA
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

   Menyatakan bahwa:

   1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima perubahan alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 28 November 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku, PIHAK PERTAMA	Selaku, PIHAK KEDUA
	Ketua,
MAHYELDI	M U H I D I
	Wakil Ketua,
	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
	Wakil Ketua,
	MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
	Wakil Ketua,
	NANDA SATRIA

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah sebesar **Rp. 6.469.050.092.948,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.274.132.092.948,00
2. Belanja Daerah	Rp.	6.438.050.092.948,00
Surplus/Defisit	Rp.	(163.918.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	194.918.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	31.000.000.000,00
A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.832.388.541.948,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	3.423.868.351.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	17.875.200.000,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	2.114.428.147.371,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	418.152.450.667,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	144.997.550.509,00
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.	154.810.393.401,00
2.1. Pendapatan Transfer		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	3.423.868.351.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah		
Pendapatan Hibah	Rp.	17.875.200.000,00
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	**Rp.**	**4.720.706.007.080,45**
1.1 Belanja Pegawai	Rp.	2.644.850.645.405,95
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.991.134.032.490,50
1.3 Belanja Subsidi	Rp.	6.500.000.000,00
1.4 Belanja Hibah	Rp.	78.221.329.184,00
2. Belanja Modal	**Rp.**	**792.711.736.536,50**
2.1 Belanja Modal Tanah	Rp.	16.849.634.001,00
2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	192.554.635.706,50
2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	167.915.009.521,00
2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	413.830.046.308,00
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.562.411.000,00
3 Belanja Tidak Terduga	**Rp.**	**33.295.149.842,00**
Belanja Tidak Terduga	Rp.	33.295.149.842,00
4 Belanja Transfer	**Rp.**	**891.337.199.489,00**
4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp.	860.837.199.489,00
4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	30.500.000.000,00

C. **Pembiayaan Daerah terdiri dari :**

1. Penerimaan Pembiayaan	**Rp.**	**194.918.000.000,00**
SILPA	Rp.	194.918.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	**Rp.**	**31.000.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah - Bank Nagari	Rp.	31.000.000.000,00

Padang, 28 November 2024

GUBERNUR
SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK PERTAMA

MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua,

M U H I D I

Wakil Ketua,

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua,

MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Wakil Ketua,

NANDA SATRIA

RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Hari/Tanggal	:	Kamis / 28 November 2024
Pukul	:	14.00 Wib
Tempat	:	Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat
Acara	:	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
Pimpinan Rapat	:	Drs. H. Muhidi, MM
Pimpinan DPRD	:	Evi Yandri Rajo Budiman
		Muhammad Iqra Chissa Putra, S.ST, MM
	:	Nanda Satria
Notulis	:	Nasrizal Rivai, SE, M.Si
Jumlah Anggota	:	65 Anggota DPRD orang terdiri dari :
1. Fraksi PKS	:	10 Orang
2. Fraksi Partai Gerindra		10 Orang
3. Fraksi Partai Golkar	:	9 Orang
4. Fraksi Partai Nasdem	:	9 Orang
5. Fraksi Partai Demokrat	:	8 Orang
6. Fraksi PAN	:	8 Orang
7. Fraksi PPP	:	5 Orang
8. Fraksi PDI-P dan PKB	:	6 Orang
Hadir	:	Anggota DPRD yang hadir terdiri dari :

1. H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed
2. Mochklasin, S.Si
3. H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP
4. H. Rafdinal, SH
5. Nurva Eva Karmila
6. Muhammad Yasin, S.TP
7. Khairuddin Simanjuntak
8. Verry Mulyadi, SH
9. Dr. Ir. H. Indra Catri, M. T Dt. Malako Nan Putih
10. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, S.Ptc
11. H. Rony Mulyadi, SE, DT. Bungsu
12. Muchlis Yusuf Abit, S.T, MM
13. Ade Putra
14. Zulkenedi Said, S. Sos, SH, M.Si, MM, MH, M.A.P
15. Hj. Sitti Izzati Aziz
16. Hj. Zaksai Kasni, SE, M.M
17. Zafri Deson, SH
18. H. Lazuardi Erman, SH
19. Drh. Nela Abdika Zamri
20. Endarmy
21. H. Abdul Rahman
22. Erick Hamdani, SE, DT. Ambasa
23. Salamat, SE, M.Si
24. H. Ilson Cong, S.E, M.M, DT. Mongguang
25. Asril, SE
26. H. Irwan Zuldani, SE, M.M

27. Bakri Bakar, SH
28. Doni Harsiva Yandra, S.IP, M.E
29. Jefri Masrul, SE
30. Hj. Aida, SH
31. Agus Syahdeman, SE
32. H. Muzli M. Nur, S.Pd
33. Daswanto, SE
34. Lastuti Darni, S.Pd
35. Hendra Halim
36. Masrisal, SH
37. Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si
38. Albert Hendra Lukman, SE
39. Sri Kumala Dewi, S.Pd
40. Bagas Panyusunan Nasution

Eksekutif : Gubernur Sumatera Barat
Asisten I Setda Provinsi Sumatera Barat
Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat
Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Inspektorat
BPKAD
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang
Dinas Perkimtan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Kearsipan dan Pustaka
Dinas Satpol PP
Dinas Perhubungan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Kesehatan
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Dinas ESDM
Dinas Sosial
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura
BPBD
Badan Pendapatan Daerah
BPSDM
Biro Hukum
Biro Perekonomian
Biro Organisasi
Biro Adpim
Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Administrasi Pembangunan
Biro Umum
RSUD M. Natsir Solok
Rumah Sakit Pariaman
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Badan Penelitian dan Pengembangan

		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesbangpol Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar Biro Kesra Setda Provinsi Sumbar Biro Umum Setda Provinsi Sumbar
BUMD		PT. Askrida PT. Jamkrida Sumbar PT. Bank Nagari
Turut Hadir	:	A. Wartawan Media Cetak dan Elektronik B. Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

JALANNYA RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Pimpinan PT. Bank Nagari, Pimpinan BUMD

Yth. Tenaga Ahli, rekan-rekan Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Kamis tanggal 28 November 2024 dengan acara " Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Peraturan Tata Tertib, bahwa rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Membacakan Daftar Kehadiran Anggota

Berdasarkan Fraksi-Fraksi

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah melebihi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum telah terpenuhi dan rapat paripurna ini telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Tahun 2025, merupakan tahun yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 (dua) agenda besar yang akan kita hadapi, yaitu transisi kepemimpinan daerah, baik ditingkat provinsi maupun di Kabupaten/kota serta dimulainya program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

Dalam kondisi tersebut, peran dan fungsi APBD Tahun 2025 sebagai instrument perencanaan anggaran, otorisasi, alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi sangat penting. APBD Tahun 2025, harus dapat mengakomodir kebutuhan program, kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya, mengakomodir program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta mengakomodir program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target base line RPJPD dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Ini tentu tidak mudah, dengan kondisi keuangan daerah yang semakin sulit dan semakin terbatasnya ruang fiskal, kita harus dapat memenuhi banyak kebutuhan dan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, APBD harus digunakan secara efisien, efektif dan tepat sasaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pembentukan Perda APBD Tahun 2025, pada Rapat Paripurna tanggal 1 November 2024 yang lalu Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, untuk dapat di bahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama TAPD telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang sebelumnya di dahului dengan pembahasan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra komisi.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk dapat menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

1. PAD merupakan kinerja utama dalam pengelolaan pendapatan daerah dan memiliki peran yang semakin penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022, masih banyak potensi PAD terutama dari pajak, restribusi dan pemanfaatan asset daerah yang belum digarap dengan optimal.
2. Perlu dilakukan inventarisasi kembali semua potensi pendapatan daerah melalui akurasi dan up date data potensi pajak dan restribusi daerah. Perhitungan target penerimaan betul-betul berdasarkan potensi yang ada, bukan hanya berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya.
3. Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait, perlu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pemungutan pajak daerah serta membangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Walinagari serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Alokasi belanja daerah yang ditampung dalam APBD Tahun 2025, harus betul-betul digunakan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan prinsip kehati-hatian, agar alokasi yang terbatas dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk percepatan Pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diakhir pembicaraan Tingkat pertama, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya terhadap hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025, dengan kesimpulan, semua Fraksi dapat menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun 2025, dilanjutkan pada tahap penetapan pada Rapat Paripurna dengan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah berakhirnya pembahasan pada pembicaraan tingkat pertama terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, maka pembahasannya dilanjutkan pada tahap pengambilan

Keputusan dalam Rapat Paripurna. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada Rapat Paripurna ini Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025.

Untuk itu, kepada Sdr. Sekretaris DPRD diminta untuk dapat menyampaikan laporan Hasil Pembahasan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025 tersebut.

.....

Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025.

.....(dibacakan oleh Plt. Sekretaris DPRD)

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD Tahun 2025 tersebut ?

Setuju (dijawab oleh semua peserta Rapat Paripurna yang hadir).

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah dapat menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama ini yang ditanda tangani nanti oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota

Persetujuan Bersama Ranperda APBD Tahun 2025

.....(dibacakan oleh Plt. Sekretaris DPRD)

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025, ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat ?

Setuju (dijawab oleh semua peserta Rapat Paripurna yang hadir).

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor : 31/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, maka acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Pimpinan DPRD dan Sdr. Gubernur kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....(Gubernur beserta Pimpinan DPRD berjalan mengambil tempat)

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama

.....(ditandatangani oleh Gubernur beserta Pimpinan DPRD)

Dengan telah ditanda tanganinya Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, maka acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Sdr. Gubernur .

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan menyampaikan sambutannya terhadap hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025.

.....Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

.....(Gubernur menuju podium menyampaikan sambutannya)

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan sambutan/pendapat akhirnya terhadap hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda tentang APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Gubernur, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dilakukan evaluasi.

Untuk itu, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaian Ranperda APBD Tahun 2025 kepada Mendagri, untuk dapat dilakukan evaluasi dan dapat pula segera ditetapkan.

Dengan telah disepakatinya Ranperda APBD Tahun 2025, maka untuk percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2025, masing-masing OPD juga sudah dapat menyiapkan semua proses administrasi pelaksanaan kegiatan termasuk melalukan proses lelang, agar APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat direalisasikan pada awal tahun 2025.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini. Sebelum rapat ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dalam rangka penetapan Ranperda APBD Tahun 2025, secara resmi kami tutup.

Terima Kasih, Wabillahi Taufiq Walhidayah Wass. Wr. Wb

Pimpinan Rapat,	Plt. Sekretaris DPRD,	Pembuat Risalah,
Drs. H. MUHIDI, MM	**ISMELDA JENREINI, S.STP, MM**	**NASRIZAL RIVAI, SE, M.Si**

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN BERSAMA TAPD
TERHADAP RANPERDA APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
KAMIS, 28 NOVEMBER 2024

ASSALAM'MUALAIKUM WR.WB

YTH. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN PT, BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. PARA WARTAWAN, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Shalawat beriring salam tercurah juga hendaknya untuk junjungan umat, Nabi Besar Muhammad SAW.

Sehubungan dengan telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dibahas oleh Badan Anggaran bersama TAPD, izinkan pada kesempatan ini kami dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

APBD merupakan instrument pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah menyusun dan menyajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 1 November 2024, Plt. Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada

DPRD, Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

B. Dasar Hukum

Pembahasan dan penetapan Ranperda tentang APBD Tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025.

II. GAMBARAN UMUM RANPERDA APBD TAHUN 2025.

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan APBD yang sangat strategis oleh karena terdapat 2 (dua) agenda penting yang diakomodir di dalamnya yaitu program prioritas Gubernur Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan program prioritas Gubernur Sumatera Barat terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 serta program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target base line RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Namun demikian, kedudukan APBD Tahun 2025 yang sangat strategis tersebut, tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah yang memadai untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang pencapaian target 2 (dua) agenda strategis tersebut. Kondisi ini dapat dilihat dari target pendapatan dan belanja yang diusulkan, jauh di bawah target RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan target APBD Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, ditargetkan sebesar Rp. 5.658.065.098.875,00 jauh dibawah target RPJMD yaitu sebesar Rp. 7.611.087.610.000,00 dan target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 6.586.576.217.900,00 yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 2.525.209.886.875,00, Pendapatan Transfer berjumlah sebesar Rp.

3.114.980.012.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah sebesar Rp. 17.875.200.000,00.

Rendahnya target Pendapatan Daerah yang diusulkan teruatama pada PAD, disebabkan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam pemungutan Pajak dan Restribusi serta adanya penurunan tarif pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Nomor : 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.

2. Belanja Daerah, dialokasikan sebesar Rp. 5.727.882.128.033,- jauh dbawah target RPJMD yaitu sebesar Rp. 7.631.108.000.000,- dan alokasi pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7.017.741.696.945,- yang terdiri dari : Belanja Operasi sebesar Rp. 4.321.015.682.443,01,-, Belanja Modal sebesar Rp. 389.747.773.594,99,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp. 997.118.671.995,- ,-

3. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 100.817.029.158,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 31.000.000.000,-

Target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2025 masih bersifat tentatif dan perlu dilakukan pendalaman kembali, oleh karena target dan alokasi yang diusulkan masih jauh dari kebutuhan untuk memenuhi target kinerja Pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan target base line RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Sedangkan target pendapatan transfer masih mempedomani alokasi tahun 2024, belum berdasarkan alokasi TKDD Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Pemerintah.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah yang ditargetkan dalam Ranperda APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.658.065.098.875,00 yang terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Target PAD yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.525.209.886.875,00 yang mencakup pajak daerah sebesar

Rp. 1.875.999.492.298,00 restribusi daerah sebesar Rp. 421.381.674.668,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 144.997.550.508,00 dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 82.831.169.401,00. Berhubung PAD merupakan kinerja utama pendapatan daerah yang perlu diupayakan secara maksimal dalam rangka kemandirian daerah, maka Badan Anggaran Bersama TAPD kembali melihat semua potensi PAD yang masih mungkin ditingkatkan.

a. Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mulai tahun 2025 terdapat tambahan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu pajak MBLB (Mineral Bukan Logam Bebatuan) dan PAB (pajak alat berat). Dengan demikian, objek pajak daerah yang dipungut mulai tahun 2025 mencakup PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, PAB, Pajak Rokok dan Opsen MBLB.

Target pajak daerah yang direncanakan sebesar Rp. 1.875.999.492.298,00 jauh dibawah target tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 2.693.451.041.456,00 dan itupun belum ada objek opsen MBLB dan PAB. Rendahnya target yang direncanakan disebabkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum akuratnya data kendaraan bermotor dan alat berat serta belum optimalnya target dari PBBKB, PAP serta pajak rokok.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Badan Anggaran Bersama TAPD kembali melihat semua potensi yang ada, meningkatkan kapatuhan wajib pajak serta menghitung kembali target yang akan dicapai, agar penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan.

Dari hasil pembahasan, terdapat peningkatan sebesar Rp. 238.428.655.073,00 yang bersumber dari peningkatan penerimaan PKB sebesar Rp. 50.000.000.000,00, BBNKB sebesar Rp. 99.000.000.000,00, PBBKB sebesar Rp. 60.055.318.017,00, PAP sebesar Rp. 3.000.000.000,00, Pajak Rokok sebesar Rp. 24.688.337.056,00 dan PAB sebesar Rp. 1.685.000.000,00. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka target pajak daerah yang akan ditampung dalam APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.114.428.147.371,00.

Terkait dengan potensi PAD dari pajak daerah dengan memperhatikan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka meningkatkan penerimaan dari sektor tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan sebagai berikut :

1. Bapenda Provinsi Sumatera Barat harus melakukan update dan validasi data jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Sumatera Barat baik yang BA maupun Non BA, untuk memastikan berapa potensi yang tersedia, agar penetapan target dapat terukur.
2. Pemerintah Daerah agar menyusun Pergub yang mewajibkan kendaraan bermotor Non BA yang beroperasi di Sumatera Barat selama 3 (tiga) berturut-turut, untuk memutasikan menjadi " BA " dan mengaitkan proses mutasi tersebut dengan pemberian pelayanan publik kepada yang bersangkutan.
3. Aparat di Bapenda agar memperbanyak turun kelapangan dan berkerjasama dengan pemerintahan nagari untuk menjemput dan menghitung secara langsung kendaraan bermotor secara door to door serta memperbanyak Razia kendaraan bermotor.
4. Memudahkan prosedur dan administratif dalam pembayaran PKB dan BBNKB.
5. Memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak, bukan memberikan keringanan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

b. Restribusi Daerah

Target restribusi daerah yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 421.381.674.668,00 yang bersumber dari restribusi jasa umum sebesar Rp. 410.561.866.375,00 restribusi jasa usaha sebesar Rp. 10.425.881.893,00 dan restribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 393.926.400,00. Target yang ditetapkan tersebut, lebih besar dari target dalam APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 414.280.722.633,00.

Dari pembahasan yang dilakukan, target restribusi daerah tersebut menjadi Rp. 418.152.450.667,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp. 3.229.224.001,00 yang bersumber dari penurunan restribusi jasa usaha.

Meskipun terdapat peningkatan target penerimaan, Badan Anggaran melihat masih bisa ditingkatkan lagi. Untuk itu, diminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait untuk dapat meningkatkan penerimaannya dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari objek restribusi, mengefisiensikan biaya pelayanan dalam penyelenggaraan restribusi, serta mendorong kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, seminar, dll dilaksanakan di tempat-tempat milik Pemerintah Daerah, bukan di hotel-hotel. Untuk biaya penyelenggaraan retribusi yang lebih

besar dari penerimaanya, sebaiknya diserahkan saja kepada pihak ketiga untuk pengelolaannya.

c. Hasil Pengelolaan Kekayadaan Daerah Yang Dipisahkan

Target penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 144.997.550.509,00- yang bersumber dari deviden PT. Bank Nagari, PT. Jamkrida sebesar PT. Askrida sebesar PT. Grafika Jaya Sumbar, PT. Balairung Citra Jaya dan PT. Pembangunan Sumbar. Target yang direncanakan tersebut, sudah merupakan target final oleh karena telah sesuai dengan hasil RUPS dari masing-masing BUMD.

Target deviden yang diterima atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 tersebut, lebih besar dari target Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 129.624.977.000,00. Namun, deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas penyertaan modalnya masih belum sebanding dengan besaran penyertaaan modal yang dilakukan, terutama untuk BUMD aneka usaha (PT. Grafika, PT. Balairung dan PT. Pembangunan Sumbar). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham, dituntut untuk terus meningkatkan kinerja BUMD dengan memperbaiki tata kelola, GCG dan meninjau kembali unit bisnisnya.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Target penerimaan dari Lain-Lain PAD Yang Sah yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 82.831.169.401,00 yang bersumber dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, pendapatan bunga, denda pajak dan ganti kerugian daerah.

Dari pembahasan yang dilakukan, terdapat penambahan sebesar Rp. 71.979.224.000,00 yang bersumber a.l dari tambahan hasil penjualan barang milik daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,00, tambahan dari Kerjasama daerah sebesar Rp. 4.000.000.000,00, tambahan jasa giro sebesar Rp. 12.500.000.000,00, tambahan dari pendapatan bunga sebesar Rp. 10.000.000.000,00 tambahan dari denda pajak daerah sebesar Rp. 22.500.000.000,00 dan tambahan pendapatan BLUD sebesar Rp. 7.979.224.000,00.

Dengan ada tambahan tersebut, maka target Lain-Lain PAD Yang Sah yang akan ditampung dalam APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 154.810.393.401,00.

2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer yang dialokasikan dalam Ranperda APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 3.114.980.012.000,00 yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat masih merupakan alokasi tahun 2024. Dengan telah ditetapkan TKDD Tahun 2025, maka terjadi peningkatan penerimaan transfer menjadi Rp. 3.423.868.351.000,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 308.888.339.000,00. Peningkatan pendapatan transfer tersebut, bersumber dari tambahan Dana Perimbangan sebesar Rp. 293.293.945.000,- dan DID sebesar Rp. 15.594.394.000,-.

Dari pendapatan transfer yang direncanakan pada Tahun 2025, terlihat bahwa DAU SG yang diterima semakin berkurang dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 350.761.029.000,- menjadi Rp. 300.882.239.000,-. Demikian juga dengan DAU BG juga semakin meningkat. Dengan kondisi ini, maka semakin ada ruang bagi Pemerintah Daerah untuk memasukan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD yang lebih banyak.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang direncanakan pada Ranperda APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 17.875.200.000,00 yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yaitu dari PT. Semen Padang, PT. Jasa Raharja, Dealer Kendaraan Bermotor dan DOC Dinas Peternakan. Dari pembahasan yang dilakukan, tidak terdapat peningkatan oleh karena target yang ditetapkan tersebut, sudah merupakan target final.

B. Belanja Daerah.

Dalam Ranperda APBD Tahun 2025, direncanakan alokasi belanja daerah, sebesar Rp. 5.727.882.128.033,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.321.015.682.443,00 Belanja Modal sebesar Rp. 389.747.773.595,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 20.000.000.000,- ,-dan Belanja Transfer sebesar Rp. 997.118.671.995,00.

Dengan adanya tambahan pendapatan yang diterima dari PAD dan Pendapatan Transfer, maka alokasi belanja daerah juga mengalami perubahan menjadi Rp. 6.438.050.092.948,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi.

   Alokasi belanja operasi yang semula direncanakan sebesar Rp. 4.321.015.682.443,00 meningkat menjadi Rp. 4.720.706.007.080,45 atau bertambah sebesar Rp. 399.690.324.637,45 yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanda bantuan sosial. Dari pembahasan yang dilakukan, disepakati sebagai berikut :

   a. Untuk belanja pegawai sebesar Rp. 2.644.850.645.405,95.
   b. Untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.991.134.032.490,50.
   c. Untuk belanja subsidi sebesar Rp. 6.500.000.000,00.
   d. Untuk belanja hibah sebesar Rp. 78.221.329.184,00.

2. Belanja Modal

   Alokasi belanja modal yang semula disediakan sebesar Rp. 389.747.773.595,00 bertambah sebesar Rp. 402.963.962.941,50 sehingga menjadi sebesar Rp. 792.711.736.536,50. Meskipun terjadi peningkatan belanja modal, namun alokasinya masih jauh dari alokasi yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 14 % dari total belanja dan masih jauh dari upaya untuk memenuhi alokasi belanja modal infrastruktur pelayanan publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 40 % dari total alokasi belanja daerah.

3. Belanja Tidak Terduga.

   Alokasi Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan dalam Ranperda APBD tahun 2025 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 dari pembahasan yang dilakukan terdapat peningkatan sebesar Rp. 13.295.149.842,05. Dengan demikian, alokasi Belanja Tidak Terduga yang ditampung dalam APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 33.295.149.842,05.

4. Belanja Transfer

   Alokasi belanja transfer yang disediakan pada Ranperda APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 997.118.671.995,00 yang digunakan untuk pembayaran bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota. Alokasi yang disediakan pada Tahun 2025, jauh lebih kecil dari tahun 2024, oleh karena mulai tahun 2025, Pemerintah Provinsi tidak lagi memberikan bagi hasil atas PKB dan BBNKB kepada Kabupaten/Kota yang sudah diganti dengan opsen PKB dan BBNKB yang dipungut langsung oleh Kabupaten/Kota.

Dari pembahasan yang dilakukan dan setelah menghitung kembali hak kabupaten/kota yang akan dibayarkan pada tahun 2025, terdapat pengurangan sebesar Rp. 105.781.472.506,-. Dengan demikian, alokasi belanja transfer yang akan ditampung dalam APBD tahun 2025 adalah sebesar Rp. 891.337.199.489,00.

Berkenaan dengan alokasi belanja daerah yang ditampung dalam APBD Tahun 2025, Badan Anggaran memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Untuk alokasi belanja modal, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah untuk konsisten secara terus menerus meningkatkan alokasi belanja modal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam upaya percepatan Pembangunan Daerah dan mengejar ketertinggalan dengan provinsi tetangga.
2. Untuk Pembangunan proyek-proyek strategis dengan alokasi anggaran yang cukup besar serta menuntaskan penyelesaian proyek-proyeksi yang masih belum rampung, disarankan untuk mencari sumber pembiayaan lain selain dari APBD, diantaranya melalui skema KPBU atau Kerjasama dengan sektor swasta.
3. Berhubung terbatasnya keuangan daerah untuk dapat membiayai Pembangunan daerah dan mencapai target kinerja yang ditetapkan, maka alokasi anggaran yang telah disediakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal, tetap sasaran serta memberikan alokasi yang lebih besar untuk kegiatan pokok dari pada kegiatan pendukung.
4. Realisasi belanja subsidi yang disediakan dalam APBD sejak 2 (dua) tahun terakhir sangat rendah. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan harapan kita untuk meningkatkan sektor usaha mikro, kecil menjadi lebih besar. Untuk itu diminta kepada PT. Bank Nagari yang menjadi penyalur untuk dapat meningkatkan penyaluran subsidi bunga yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

Untuk menutup defisit belanja Tahun 2025, dalam Ranperda APBD Tahun 2025 direncanakan dari penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp. 100.817.029.158,00 yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya. Dari pembahasan yang dilakukan dengan memperhatikan realisasi pendapatan dan belanja pada APBD Tahun 2024 sampai November 2024, terdapat peningkatan sebesar Rp. 94.100.970.842,00. Dengan demikian penerimaan pembiayaan yang akan ditampung dalam APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 194.918.000.000,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi untuk pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Nagari, pada Ranperda APBD Tahun 2025 dialokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 31.000.000.000,00 Dari pembahasan yang dilakukan, alokasi tersebut tidak mengalami perubahan.

D. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

E. KOMPOSISI RANPERDA APBD TAHUN 2025

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, maka disepakati komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 6.274.132.092.948,00
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 2.832.388.541.948,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 3.423.868.351.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah	Rp. 17.875.200.000,00
2. Belanja Daerah	Rp. 6.438.050.092.948,00
a. Belanja Operasi	Rp. 4.720.706.007.080,45
b. Belanja Modal	Rp. 792.711.736.536,50
c. Belanja Tidak Terduga (BTT)	Rp. 33.295.149.842,05
d. Belanja Transfer	Rp. 891.337.199.489,00
3. Pembiayaan Daerah	Rp. 163.918.000.000,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 194.918.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 31.000.000.000,00

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD yang dapat kami laporkan pada Rapat Paripurna ini.

Padang, 28 November 2024

BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT,

KETUA,

DRS. H. MUHIDI, MM

SEKRETARIS,

ISMELDA JENREINI, S.STP, MM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

1. **RANPERDA TENTANG RANCANGAN APBD 2025**
2. **PROPEMPERDA 2025**
3. **RENCANA KERJA DPRD Tahun 2025 dan RENCANA KERJA DPRD 5 (Lima) Tahunan**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 November 2024 oleh juru bicara Drs. H. Nurfirman Wansyah .,MM.,Apt

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth: Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
Yth: Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN, dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah *Azza wa Jalla Tuhan Yang Maha Esa*, kita memuji dan memujaNya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Shalawat* serta salam semoga

senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin...*

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadiri yang berbahagia

1. Ranperda tentang APBD 2025

Sebagaimana kita pahami bahwa APBD ini merupakan instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga keberlanjutan ekonomi di tingkat daerah. Implementasi APBD yang baik sangat menentukan keberhasilan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

APBD 2025 berfokus untuk mendukung transisi pemerintahan setelah Pilkada Serentak 2024 serta kegiatan pencapaian target base line RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Penyusunan APBD ini mengacu pada pedoman dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas daerah, serta mempertimbangkan dinamika dan tantangan pembangunan daerah.

APBD 2025 juga harus mengakomodir amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah diantaranya yaitu:

1. Optimalisasi pendapatan daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dengan memaksimalkan PAD (Pajak dan Retribusi Daerah).
2. Pemanfaatan DAU dan DAK serta DBH yang harus mendukung prioritas nasional dan daerah.

3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah, memanfaatkan insentif daerah yang bekinerja baik seperti alokasi dari dana Insentif fiskal.

Selain itu tahun 2025 juga merupakan masa pemberlakukan opsen bagi Kabupaten / Kota terhadap PKB, BBNKB sehingga berdampak pada pendapatan provinsi.

Setelah membaca, mendiskusikan dan memahami laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan TAPD terkait RAPBD 2025. Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat akan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Rancangan APBD 2025 memberikan isyarat yang baik terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yang mana saat dihadapkan pada kondisi yang penuh tantangan, kita bisa menghasilkan Rancangan APBD yang cukup membanggakan, dimana kita bisa menaikkan pendapatan sebesar Rp. 611 M lebih pada sektor, sehingga belanja kita tembus angka Rp. 6,433 T, dimana terjadi kenaikan belanja sebesar Rp 700 M dari usulan semula Rp. 5.727.882.128.033
    - PAD (Pajak dan Retribus daerah sebesar Rp. 302.178.655.073
    - Dana Transfer Rp. 308 M Lebih
    - Silpa di target 194 M angka ini merupakan kebijakan yang moderat..
    - Semua ini merupakan hal yang patut kita beri apresiasi atas hasil yang cukup signifikan dalam pembahasan RAPBD 2025

    Terhadap adanya kenaikan yang cukup siknifikan ini dari pos PAD tentu menuntut kesungguhan dari TAPD bersama perangkatnya untuk bekerja serius dan sungguh – sungguh dalam mencapai target-target yang sudah di tetapkan dalam Rancangan Perda APBD ini.

2. Berkenaan postur APBD 2025 Fraksi PKS mengusulkan terus dilakukan penyempurnaan, masih ada program belanja yang masih kesulitan untuk disesuaikan dengan aturan seperti belanja pegawai yang nilainya cukup besar Rp 2,6 T. Tentu saja ini perlu ada evaluasi, dan penataan berkenaan sistem kepegawaian kita. Kemudian belanja modal yang baru mendekati angka 14 %, tentu ini menjadi PR bersama kita ke depan memperbaiki struktur belanja.
3. Pos belanja sebesar 12% untuk sektor pertanian harus terus dilakukan evaluasi dari sisi distribusi terhadap sub urusan agar nilai anggaran tersebut benar-benar mempunyai out come dan impact di sektor pertanian, yang menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian dan kontribusi besar dalam PDRB sumbar.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

2. Propemperda 2025

Hasil pembahasan Bapemperda bersama Kemendagri dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta melihat realisasi jumlah Perda yang telah ditetapkan Tahun 2024 serta sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (6) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 disepakati total pembentukan Perda baru yang direncanakan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebanyak 16 (enam belas) Ranperda yaitu :

No	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi	Usulan Baru (Pemprov)

2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	BAPPEDA	Usulan Baru (Pemprov)
3	Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan Baru (Pemprov)
4	Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan Baru. (Pemprov)
5	Peubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Usul Inisiatif DPRD	Usulan Baru. (DPRD)
6	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Usul Inisiatif DPRD	Usulan Baru (DPRD)
7	Ranperda tentang APBD Tahun 2026.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ranperda Kumulatif Terbuka
8	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ranperda Kumulatif Terbuka
9	Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024.	Badan Pengelolaan	Ranperda Kumulatif Terbuka

		Keuangan dan Aset Daerah	

Selanjutnya juga disepakati 7 Ranperda yang merupakan luncuran dari Propemperda Tahun 2024 dan Tahun 2023, sebagai berikut :

No	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Luncuran 2024 (Usul Pemprov)
2.	Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Luncuran 2024 (Usul Pemprov)
3.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Luncuran 2024 (Usul Pemprov)
4	Ranperda tentang Fasilitasi dan Penguatan Pesantren.	Komisi V	Luncuran 2024 (Usul DPRD)
5	Penyelenggaraan Penyiaran di daerah	Usul Prakarsa Komisi I	Luncuran 2023 (Proses Pembahasan)
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda)	Badan Pengelolaan	Luncuran 2023 (Belum disampaikan ke DPRD)

		Keuangan dan Aset Daerah	
7	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Biro Organisasi	Luncuran 2023 (Pemprov)

Bahwa penyusunan pembentukan peraturan daerah ini merupakan langkah awal pelaksanaan fungsi Legislasi daerah DPRD, maka kami FPKS sangat menyambut baik disusunnya propemperda ini. Penyusunan program pembentukan Peraturan Dearah tahun 2025 ini tentu banyak harapan yang tertumpang pada tahun ini, namun kami juga menyadari bahwa masih ada beberapa ranperda pada tahun sebelumnya belum kita sahkan menjadi Perda, maka sebagian dari yang tertunda itu hendaknya dapat kita sahkan di tahun 2025 nanti.

Fraksi PKS setelah membaca dan memahami laporan pembahasan Propemperda 2025 memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS meminta Ranperda yang diusulkan di 2025 ini benar-benar tuntas dilaksanakan hingga akhir tahun, semoga ini bisa terlaksana sebagai indikator produktifitas dan keberhasilan kinerja DPRD. untuk itu kita minta pimpinan dan bapemperda betul betul mengawal dan melakukan supervisi terhadap pembahasan Propemperda ini menjadi perdanya nanti.
2. Fraksi PKS mendkung penuh atas adanya usulan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan petani, di harapkan bahwa ranperda ini mengakomodir keluhan-keluhan petani pada saat ini, seperti kesulitan dalam memperoleh pupuk, mahalnya harga pupuk, dan stabilitas harga pasar atas komoditi pertanian di pasar. Serta dalam ranperda ini nanti diharapkan adanya peran pemerintah dalam mengakomodir swasembada pangan sehingga petani

teberdayakan dalam pengolahan hasil pertanian menjadi barang jadi bernilai jual tinggi.

3. Fraksi PKS mendukung atas masukan Ranperda tentang Fasilitasi dan Penguatan Pesantren dalam Propemperda 2025, harapannya agar Ranperda tentang Fasilitasi dan Penguatan pesantren benar-benar mengakomodir terkait permasalahan pengelolaan pesantren di Sumatera Barat.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang berbahagia

3. Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) DPRD 5 (Lima) Tahunan. Fraksi PKS setelah membaca dan memahami Renja DPRD 2025 Memberikan Pandangan Sebagai Berikut:
   a. Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2025
      1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 perlu didasarkan pada visi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana Kerja ini menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas DPRD, termasuk dalam menyusun kebijakan anggaran melalui APBD, memformulasikan peraturan daerah, serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan.
      2. Dalam hal penyusunan Perda Provinsi, F.PKS berpendapat perlunya efektifitas dalam penyusunan legislasi. Pastikan bahwa rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang disusun mencerminkan kebutuhan strategis masyarakat.
      3. Fraksi PKS mendorong adanya kajian komprehensif dan adanya data faktual sebelum mulainya pembahasan RAPBD untuk mengukur kemampuan keuangan daerah, sehingga dapat

mengatur program-program kerja yang relevan untuk diakomodir dalam APBD.

b. Rencana Kerja (Renja) DPRD 5 (Lima) Tahunan

1. Fraksi PKS memandang bahwa penyusunan Renja Lima tahunan DPRD ini juga merupakan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya dan perbaikan untuk lima tahun kedepan. Bahwa Renja DPRD ini terukur dengan prinsip akuntabilitas melalui perencanaan berbasis hasil (result-based planning) seperti penetapan target kinerja, alokasi anggaran, serta indikator keberhasilan yang diukur secara tahunan dan lima tahunan. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi, seperti belum maksimalnya pengusulan Ranperda dan Ranperda Prioritas dan kurang optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah.
2. Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Kegiatan pembahasan kebijakan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dapat dilihat bahwa kurang maksimalnya dalam serapan anggaran dalam lima tahunan belakangan, Fraksi PKS memandang bahwa diperlukan pendekatan *value-for-money* untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dengan menerapkan evaluasi berbasis kinerja secara sistematis.
3. Fraksi PKS mendorong pembahasan ranperda maksimal dalam mendengarkan partisipasi publik. Namun, kenyataanya masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses ini, menunjukkan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi publik, seperti konsultasi publik yang lebih inklusif dan transparan. Serta menyusun schedule pembahasan Ranperda yang lebih baik untuk menghindari penumpukan agenda di akhir tahun.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang berbahagia

Setelah mempelajari dengan seksama akhirnya Fraksi PKS berkesimpulan bahwa secara umum hasil pembahasan Ranperda tentang APBD 2025, Propemperda 2025 dan Renja DPRD 2025 dan Renja DPRD 5 (Lima) Tahunan diatas telah diselesaikan, besar harapan kami kiranya hasil keputusan ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran. Untuk itu, dengan berserah diri kepada Allah SWT dan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahiim" Fraksi PKS menyatakan **dapat menerima** Ranperda tentang APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah serta menerima Propemperda 2025 dan Renja DPRD 2025 dan Renja DPRD 5 (Lima) Tahunan dengan mempertimbangkan masukan-masukan diatas.

Aqulu Qauli Hadza, Wastaqhfirullah Li Walakum Wa afwan minkum *ASSALAMUALAIKUM, WR, WB.*

Padang, 26 November 2024 M
24 Jumadil Awwal 1446 H

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)

DPRD SUMATERA BARAT

Drs. H.Nurfirman Wansyah .,MM.,Apt
Juru Bicara

FRAKSI PKS • DPRD PROV. SUMATERA BARAT •

H. Irsyad Syafar .Lc.M.Ed
Ketua

Syofian Hendri .S.Pd.I.,MM
Sekretaris

FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

GERINDRA

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

1. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD TAHUN ANGGARAN 2025**
2. **PROPEMPERDA TAHUN 2025, dan**
3. **RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2025 DAN LIMA TAHUNAN**

Disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir DPRD Provinsi Sumatera Barat

Selasa, 26 November 2024

Juru Bicara : Verry Mulyadi, SH

Assalamualaikum Wr. Wb
Yang terhormat
Sdr. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan dan Anggota TAPD Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Peserta Rapat Kerja Pembahasan Akhir yang kami muliakan

Alhamdulilahirabbil a'lamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua, pada rapat hari ini, dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas 3 (tiga) Ranperda pada hari ini, yakni Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Propemperda tahun 2025 dan Rencana Kerja DPRD tahun 2025 dan Lima tahun kedepan.

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.ig

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Bapak Ibu Hadirin yang Berbahagia

Berkaitan dengan 3 Ranperda tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. RANPERDA TENTANG APBD Tahun Anggaran 2025

APBD 2025 memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan RPJPD 2025-2045, karena APBD ini menjadi APBD pertama dari pelaksanaan RPJPD 2025-2045, yang akan diterapkan pada masa pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Gubernur Sumatera Barat baru, hasil Pilkada serentak 27 November 2024 besok.

APBD 2024 menjadi instrumen keuangan dalam pelaksanaan visi, misi, program unggulan dan sasaran pembangunan daerah.

1. Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemprov Sumbar yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan baik. Kami percaya bahwa pembahasannya tidaklah mudah dan menguras energi.

2. Seperti kami sampaikan tadi bahwa APBD ini memiliki nilai penting, karena ini adalah APBD pertama di masa pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada serentak 27 November 2024. Harapan kami tentu saja, APBD ini bisa mendukung program-program prioritas pemerintahan baru. APBD tahun 2025 seharusnya akan menjadi alat yang efektif untuk memperkuat perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial. Program-program yang diusulkan harus mampu menjaga

pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan stabil dari waktu ke waktu.

3. Proyeksi Pendapatan Daerah yang diusulkan dalam APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp.6,269 Triliun, atau terdapat kenaikan Rp 611 Miliar lebih dibanding usulan awal yang hanya Rp 5,658 Triliun. Angka yang lumayan cukup signifikan, namun Fraksi Partai Gerindra meminta Pemrov lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menggali sumber-sumber pendapatan. Dengan demikian, maka kedepan, APBD kita tidak hanya berkutat pada angka Rp 6 Triliun, tapi sudah bisa menembus angka Rp 7 Triliun.
4. Fraksi Partai Gerindra sangat berharap, alokasi dan distribusi anggaran pada APBD 2025 ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah, terutama mengantisipasi melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran, mahalnya harga-harga dan lemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, distribusi anggaran juga harus mengarah pada penguatan ekonomi UMKM, sebagai salah satu penopang utama ekonomi daerah
5. Fraksi Partai Gerindra memandang perlu ada alokasi anggaran untuk pengawasan area pertambangan. Banyak laporan yang kami peroleh berkaitan dengan penambangan yang tidak sesuai dengan SOP penambangan. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, tapi juga infrastruktur. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, bisa mengganggu program Presiden untuk menghadirkan ketahanan pangan. Kami berharap agar OPD-OPD terkait tidak bersikap lepas diri, dengan kewenangan yang ditetapkan pusat. Tetapi kita didaerah perlu mengayomoi ini sehinggadaerah dan masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Ini merupakan tugas kita bersama di Sumatera Barat.

6. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sesuai catatan BPS, pada Triwulan 3-2024, perekonomian Sumatera Barat secara kumulatif tumbuh sebesar 4,48 persen, naik dibanding Triwulan II. Meski begitu, Sumatera Barat masih berada pada urutan ke-7 dibanding provinsi lain di Pulau Sumatera. Kita masih kalah jauh dibanding tetangga terdekat, yakni Provinsi Jambi, Riau ataupun Sumatera Utara. Sumatera Barat hanya menyumbang 1,50 % terhadap perekonomian nasional dan 6,72 % terhadap perekonomian di Pulau Sumatera. Fraksi Partai Gerindra berpendapat, perlu kerja serius dan kerja keras lagi agar pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat bisa tumbuh lebih baik lagi.
7. Pemprov perlu menggenjot lagi pendapatan dari komponen Pendapatan Lain-lain yang Sah. Sudah sejak lama kami di Fraksi Partai Gerindra mengingatkan banyak asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tidak termanfaatkan dan terkelola dengan baik. Padahal, ini bisa menjadi sumber penerimaan. Sekarang kami ingatkan lagi akan pentingnya optimalisasi pengelolaan asset daerah. Terserah, mau dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Yang penting adalah bisa menambah peningkatan penerimaan daerah.
8. Terkait pendapatan transfer, Fraksi gerindra meminta pemprov untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat. Selama ini kita cenderung menerima apa adanya saja yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Padahal, menurut hemat kami di Fraksi Partai Gerindra, sesungguhnya urusan transfer daerah juga dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara daerah dengan pusat. Fraksi Gerindra meminta ini disikapi serius dengan menindaklanjuti ke kementrian. Pemerintah provinsi bisa melibatkan banyak pihak, termasuk DPRD dalam mendapatkan sumber pendapatan ini.
9. Fraksi Gerindra mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi program yang dikerjakan masing-masing OPD di tahun 2025 nantinya. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran. Kami perlu mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di awal tahun, bukan di akhir tahun, sehingga SILPA tidak besar.

10. Fraksi Gerindra juga meminta Gubernur memerintahkan seluruh OPD agar benar-benar melaksanakan anggaran, apakah itu dari sumber APBN maupun dana APBD. Kesungguhan itu harus terlihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hinga ke pelaporan, sehingga nantinya realisasi anggaran bisa maksimal dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat.
11. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat harus menerapkan konsep *monitoring* (pengawasan berlanjut), *reporting* (pelaporan capaian kinerja SKPD) dan *verivable* (dapat dibuktikan) atas kinerja semua OPD. Konsep itu dilakukan per-triwulan untuk memudahkan pengawasan, apakah SKPD menjalani tahap demi tahap program yang telah disusunnya atau tidak. Ini secara tidak langsung juga bagian dari deteksi dini terhadap penyimpangan target yang mungkin terjadi. Fraksi Partai Gerindra meminta perlunya dilakukan evaluasi terhadap kinerja OPD-OPD, terutama yang peru kami sorot adalah kinerja Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura.

II. RANPERDA TENTANG PROPEMPERDA 2025

Terkait Ranperda tentang Propemperda 2025, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pembentukan Perda merupakan salah satu fungsi strategis DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai fungsi strategis, maka dalam pembentukan-pembentukan Perda, DPRD perlu memperhatikan urgensi, manfaat dan dampak dari Perda tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sekaligus, tatanan kehidupan masyarakat di daerah, serta memperhatikan juga sinkronisasi dan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang diatas, agar Perda yang dibentuk tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. Supaya sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka pembentukan

Perda perlu direncanakan secara matang dalam Propemperda, yang disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

3. Dalam Propemperda tahun 2025 disepakati ada 20 (dua puluh) Ranperda baru yang akan dibahas, termasuk Ranperda luncuran tahun sebelumnya Menurut hemat Fraksi Partai Gerindra, patut dipertimbangkan dari sisi banyaknya Perda yang akan dibahas ini, agar lebih efektif dan tidak meninggalkan catatan kurang baik di kemudian hari. Banyak Perda dibahas, tapi tak selesai-selesai.

4. Fraksi Partai Gerindra berharap, Ranperda yang akan dibahas benar-benar sejalan dengan kondisi terkini atau dengan kata lain, harus menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa proses penyusunan peraturan daerah melibatkan partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan transparansi agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5. Fraksi Partai Gerindra meminta agar Perda-perda terdahulu yang sudah dibahas dan menjadi produk hukum resmi, agar diinvestarisir kembali. Kami yakin dan percaya, dari ratusan Perda yang sudah diundangkan, banyak yang sudah tidak layak pakai lagi. Kalau ada yang tidak relevan dengan kondisi hari ini, Fraksi Partai Gerindra meminta agar Perda-perda tersebut segera direvisi atau dicabut saja, agar tidak memberatkan isi lemari perundang-undangan.

III. RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2025 dan LIMA TAHUN KEDEPA

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Banmus sebagai Tim Pembahasan Renja DPRD Tahun 2025 yang telah melaksanakan pembahasan secara optimal.

Kami tidak ada masalah dengan Rencana kerja yang telah disusun tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini bisa membuat kinerja DPRD semakin berkualitas dan produktif.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi seluruh anggota DPRD dalam menyusun Rencana Kerja DPRD tahun 2025 dan lima tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa rencana kerja ini merupakan fondasi penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam mewujudkan rencana kerja ini. Kami percaya bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan sinergi yang baik, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk Sumatera Barat yang lebih maju dan sejahtera.

Hadirin, bapak ibu sekalian

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Propemperda tahun 2025 dan Rencana Kerja DPRD tahun 2025 dan Lima tahun kedepan.

Maka berdasarkan catatan-catatan yang kami sampaikan diatas, dengan mengucaokan BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, Fraksi Gerindra dapat MENYETUJUI jika 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut dijadikan PERATURAN DAERAH

Wabillahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK

PARTAI GERINDRA INDONESIA RAYA DPRD PROV. SUMBAR

Sekretaris

MARIO SYAHJOHAN

Penasehat :

Evi Yandri Rajo Budiman

Wakil Ketua : Verry Mulyadi, SH

Anggota :

1. Dr.Ir.H.Indra Catri, MT
2. Mukhlis Yusuf Abit, ST,MM
3. Nurkhalis Dt.Bijo Dirajo, S.Pt
4. Ronny Mulyadi Dt.Bungsu, SE
5. Jempol
6. Ade Putra

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
~~HASIL PEMBAHASAN~~ RANPERDA
TENTANG
RANCANGAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA PEMBAHASAN AKHIR
RAPBD 2025
SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang kami hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat /Pimpinan dan segs OPD Pem. Sumbar.

Sdr. PLT Sekretaris Daerah, ~~Asisten~~, ~~Staf~~ Ahli, Kepala OPD dan Kepala Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, rekan-rekan wartawan, undangan dan hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada kesempatan ini, untuk melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka Penyampaian Pendapat akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini, aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sdr. Gubernur , Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari fraksi Partai Golkar untuk

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

menyampaikan Pendapat akhir Fraksi pada Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat diruangan rapat ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat. Semoga amanah yang diberikan kepada saya ini dapat saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sdr. Gubernur , Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati

→ Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD dan Apresiasi yang tinggi kepada TAPD Provinsi Sumatera Barat yang telah dapat merampungkan hasil pembahasan Ranperda Tentang Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berjalan dengan lancar dan penuh dengan suasana ~~kekeluargaan~~. kemitraan

Sebelum kami menyampaikan keputusan Fraksi Partai Golkar, izinkan kami menyampaikan pendapat dan saran terhadap hasil pembahasan Ranperda Tentang Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemprov untuk melakukan upaya serius dalam memvalidasi jumlah wajib pajak khususnya dengan PKB dan BBNKB dan sebarannya pada masing-masing Kabupaten dan Kota karena masih terdapat perbedaan data antara BPS dan Dirlantas Polda Sumatera Barat termasuk masalah masih tingginya angka kendaraan yang mati pajak.
2. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemprov untuk mengambil langkah inovatif dalam upaya meningkatkan PAD khususnya dari sektor PKB dan BBNKB, misalnya dengan menggunakan cara berfikir terbalik, yakni jika selama ini upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan PKB dan BBNK adalah melalui pemutihan denda dan aspek biaya tertentu, maka kiranya juga dapat dilakukan upaya dengan cara pemberian reward kepada wajib pajak yang menunjukkan kepatuhannya atas kewajiban pajak yang mereka tunaikan pada saat ditunaikan tepat waktu atau justru sebelum waktu jatuh tempo pajak tsb.
3. Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin komplek dan membutuhkan pembiayaan yang besar, maka kami dari Fraksi Partai Golkar mendorong dilakukannya akselerasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat sesuai dengan amanat Pasal 42 ayat (4) Perda Nomor 8 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Pemprov atas kenaikan anggaran terkait dengan kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. dalam rangka peningkatan investasi lokal dan asing ke Provinsi Sumatera Barat.
5. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Pemprov untuk melakukan pembenahan terhadap beberapa Panti yang berada dalam tanggung jawab Pemprov Sumatera Barat melalui pengalokasian anggaran seperti Panti PSAA Tri Murni, Panti PSAABR Budi Utama, Panti Asuhan Sabai Nan Aluih di Nagari Sicincin terkait kebutuhan dasar pelayanannya, karena dalam penilaian kami dan aspirasi masyarakat yang masuk kepada Fraksi Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, beberapa Panti yang ada dalam tanggung jawab Pemprov Sumatera Barat tsb masih kekurangan anggaran untuk pelayanan dasarnya.
6. Fraksi Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat menilai bahwa beberapa sekolah menengah atas boarding yang menjadi kewenangan Pemprov Sumatera Barat juga membutuhkan perhatian khusus terkait dengan kondisi asrama, konsumsi siswa dan peralatan pendidikan seperti Chromebook. Kondisi ini dapat dilihat misalnya di SMAN 2 SUMBAR yang mengeluhkan kurangnya asrama guna memenuhi kebutuhan daya tampung siswa dan kurangnya peralatan yang dibutuhkan.
7. Pada aspek layanan kesehatan, Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemprov untuk mengalokasikan anggaran untuk beberapa rumah sakit yang berada dalam tanggung jawab Pemprov Sumbar, diantara nya seperti Rumah Sakit RSUD M. Natsir yang membutuhkan instalasi listrik dan AC pada gedung IGD nya dan RS Ahmad Muchtar yang juga membutuhkan peningkatan fasilitas pada ruang IGD nya.
8. Terkait Hotel Balairung yang dikelola oleh PT Balairung, yang telah dikerjasamakan dengan pihak eksternal dalam hal ini PT Horizon, maka Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemprov untuk memastikan seluruh prosesnya dengan lebih akuntabel dan transparan, agar Pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat dapat memastikan keberadaan Hotel Balairung tersebut betul-betul membawa manfaat ekonomis dan tidak lagi menjadi beban keuangan bagi Provinsi Sumatera Barat.
9. Kami dari Fraksi Partai Golkar meminta kepada Saudara Sekda selaku Ketua TAPD untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Kepala OPD dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, khususnya yang bersifat fisik sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan tepat waktu, tidak tertunda-tunda, efektif dan produktif.

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Setelah kami mengemukakan pendapat dan saran,
Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim " **dapat menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 **untuk ditetapkan** menjadi **Peraturan Daerah** Provinsi Sumatera Barat, dengan catatan semua yang telah disepakati dalam pembahasan oleh Banggar DPRD bersama TAPD dan penyampaian pendapat akhir fraksi hendaknya dilampirkan sebagai bahan dalam penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 .

Demikianlah Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya.

Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi Taufik Walhidayah...
Assalamualaikum ww...

Padang, 26 November 2024
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua	Sekretaris
Oto	
(Yogi Pratama, SE)	**(Dra. Sitti Izzati Aziz)** Hj.

Juru Bicara

(Dra. SITTI IZZATI AZIZ)
Hj.

1. Zulkenedi Said, S.Sos,S.H.,M.Si.,M.M.,M.H.,M.AP (Wakil Ketua)
2. Zaksai Kasni, SE, MM (Bendahara)
3. M. Iqra Chissa Putra, S.ST, MM (Anggota)
4. H. Zuldafri Darma, SH (Anggota)

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

5. Drh. Nela Abdika Zamri, M.M., M.Si (Anggota)
6. Zarfi Deson, SH (Anggota)
7. H. Lazuardi Erman, S.H (Anggota)

FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133

بسم الله الرحمن الرحيم

Pendapat Akhir
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Disampaikan pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir
Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Selasa, 26 November 2024

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Kepala OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunianya kepada kita untuk dapat menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari ini.

Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat dan suri teladan yang mulia. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, yang membawa cahaya hidayah, menuntun kita menuju jalan yang lurus, dan menjadi teladan sempurna dalam akhlak, kesabaran, dan kebaikan. Semoga shalawat, salam, serta keberkahan Allah selalu tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Pembahasan Akhir Antara DPRD Sumbar dengan Pemerintah Daerah di ruang yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi Partai NasDem yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, semoga kerja keras tersebut akan menjadi amal shaleh serta memberikan kemaslahatan bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat.

Setelah mendengar dan membaca serta memperhatikan penyampaian jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyusunan anggaran dilakukan melalui kebijakan umum anggaran pemerintah dan belanja daerah. Penyusunan kebijakan umum anggaran tersebut dilakukan berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang dikondisikan dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi perekonomian serta laju inflasi dalam daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pimpinan Dewan, dan hadirin yang kami hormati

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD, diperoleh komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditampung dalam APBD Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah **Rp. 6.269.132.092.948,-**
   a. PAD Rp. 2.827.388.541.948,-
   b. Pendapatan Transfer Rp. 3.423.868.351.000,-
   c. Lain-Lain PAD yang sah Rp. 17.875.200.000,-
2. Belanja Daerah **Rp. 6.433.050.092,98,-**
   a. Belanja Operasi Rp. 4.410.946.239.890,-
   b. Belanja Modal Rp. 577.642.326.595,-
   c. Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp. 26.974.070.362,-
   d. Belanja Transfer Rp. 891.337.199.489,-
3. Pembiayaan Daerah
   a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 194.100.970.842,-,-
   b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 31.000.000.000,-

Pimpinan Dewan, dan hadirin yang kami hormati

Setelah mencermati dan melakukan analisa terhadap laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, yang merupakan tahun ke 5 (lima) dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. maka Fraksi Partai NasDem memberikan beberapa catatan sebagai masukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Setelah melalui pembahasan yang mendalam tentang Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, maka dengan ini kami Fraksi Partai NasDem memberikan pendapat akhir sebagai berikut :

1. Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya APBD Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumtera Barat. kami memberikan sejumlah catatan, termasuk kebutuhan akselerasi produktivitas sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata, yang dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Fraksi Partai NasDem juga mendukung penggunaan APBD sebagai instrumen untuk memenuhi target RPJPD Tahun 2025-2045, terutama dengan fokus pada transformasi ekonomi yang inklusif. Perhatian diberikan kepada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya lokal dan pemanfaatan anggaran untuk program prioritas.
3. Untuk pengelolaan anggaran, kami mengingatkan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam belanja daerah, terutama untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah, yang sempat dilaporkan mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya.
4. Selanjutnya di hampir seluruh nagari Sumatera Barat, sudah lahir BUMNAG yang idealnya dapat menjadi tulang punggung masyarakat petani, setidaknya dalam nagari yang bersangkutan. Usaha kita sudah ada, seperti membawa

para pelaku BUMNAG ke berbagai daerah yang memiliki BUMDES yang maju. Namun kita belum mampu mengawal dan menggiring mereka menumbuh kembangkan BUMNAGnya menjadi unit-unit usaha yang tangguh dalam nagarinya. Bila BUMNAG ini hidup apalagi berkembang dalam nagari, maka dia akan menjadi wadah yang tangguh dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat di nagari yang hari ini diisi oleh anak-anak kita yang tamat dari berbagai perguruan tinggi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan BUMNAG adalah : Penguatan Kapasitas Manajerial, Pendampingan Berkelanjutan, Akses Pembiayaan, Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Pemasaran Digital.

5. Sehubungan dengan Belanja Daerah kami dari Fraksi Partai NasDem juga mengharapkan adanya keseimbangan antara Belanja Modal dengan Belanja Operasi yang alokasi Anggarannya pada kegiatan kegiatan yang bersentuhan dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami juga setuju dengan pembahasan dan koreksi dari Badan Anggaran terhadap beberapa mata anggaran yang perlu dikoreksi lagi seperti Belanja Pegawai.
6. Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat menyoroti pentingnya keseriusan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti usulan yang diberikan oleh Badan Anggaran DPRD terkait Rancangan APBD Tahun 2025. kami menekankan bahwa usulan tersebut harus diterapkan secara konkret untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam mendukung pembangunan daerah.
7. Fraksi Partai NasDem juga meminta agar Pemerintah Daerah benar-benar memperhatikan saran yang menyangkut optimalisasi anggaran di sektor strategis, seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, implementasi anggaran harus sesuai dengan target RPJMD, termasuk

memperhatikan penyesuaian dengan transisi kepemimpinan daerah setelah Pilkada Tahun 2024.

8. Fraksi Partai NasDem meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan yang lebih efektif. Kami Fraksi Partai NasDem menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan riset potensi pendapatan daerah (RISPODA) dengan melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Barat serta Konsultan yang bergerak di bidang Pendapatan Asli Daerah. Fraksi NasDem berharap kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Akademisi, dan Konsultan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan terukur dalam pengelolaan PAD.
9. Fraksi Partai NasDem berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan harus taat anggaran dan tepat waktu dalam pelaksanaannya.
10. Fraksi Partai NasDem menyatakan bahwa kami dapat menerima Rancangan APBD Tahun 2025 setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pendapat akhir ini, kami mengapresiasi jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pandangan serta usulan dari berbagai fraksi, termasuk saran dari Fraksi NasDem sendiri. Kami berharap agar usulan yang disampaikan, khususnya terkait prioritas pembangunan, benar-benar dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan. Fraksi Partai NasDem juga menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah dalam melaksanakan anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai NasDem dengan ini **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 **dijadikan sebagai Peraturan Daerah** tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Pembahasan Akhir Antara DPRD Sumbar dengan Pemerintah Daerah ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kita mohon ampun.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

وَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 26 November 2024

Asril, SE
Juru Bicara

Fraksi Partai NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Ketua,	Sekretaris,
Endarmy	**Erick Hamdani, SE Dt. Ambasa**

Fraksi NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
JL.KHATIB SULAIMAN NO.87 (0751) 7057591-7057592-7057593 FAX (0751)59238 PADANG

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2025

DISAMPAIKAN OLEH : MASRISAL, S.H
TANGGAL. : 26 November 2024

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

- Sdr. Plt.Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta Anggota DPRD Prov. Sumbar
- Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumbar.
- Sdr. Pj.Sekda, Ka. BPK-RI Perwakilan Prov. Sumbar, Asisten, tenaga ahli, Ka. Badan dan Dinas di lingkungan Pemprov Sumbar, Pimpinan BUMN dan BUMD.
- Sdr. Rektor PTN/PTS, Pimpinan Parpol dan Ormas, hadirin dan hadirat serta rekan wartawan media cetak dan elektronik yang berbahagia.

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri rapat

paripurna pada pagi hari ini. Selanjutnya shalawat beriring salam kita sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun umatnya ke jalan yang diberkahi oleh Allah SWT.Aamiin YRA.

Saudara Plt. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang Kami Hormati,

Izinkanlah Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan rapat paripurna atas telah diberikannya kesempatan Fraksi PAN untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap **berkenaan dengan APBD TAHUN 2025, PROPEMPERDA TAHUN 2025, RENJA DPRD TAHUN 2025 DAN RENJA DPRD 5 (LIMA) TAHUNAN** Selanjutnya ucapan terima kasih kepada teman-teman Fraksi PAN yang telah memberi amanah kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum ini. Semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Saudara Plt.Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang Kami Hormati,

RANPERDA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dearah (APBD) tahun 2025 berada pada posisi transisi, pergantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur dan wakil Gubernur yang akan dilaksanakan serentak pada Rabu, 27 November 2024. Pada kesempatan ini Fraksi PAN menyampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat agar

datang ke TPS dekat rumah kita masing-masing untuk menggunakan hak pilih kita sebagai kewajiban kepada bangsa dan negara serta memenuhi tanggungjawab kita kepada daerah Sumatera Barat yang kita cintai ini.

Saudara Plt.Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang Kami Hormati,

Fraksi menyampaikan Pendapat Akhir fraksi tentang APBD 2025 meliputi Pendapatan Dearah, Belanja daerah dan pembiayaan daerah berdasarkan ketetapan KUA PPAS 2025 yang di putuskan beberapa waktu lalu.

1. Pendapatan Daerah

Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Badan Anggaran DPRD yang telah dapat merampungkan hasil pembahasan Ranperda Tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional, izinkan kami menyampaikan pendapat dan saran terhadap hasil pembahasan Ranperda Tentang Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, sebagai berikut :

1. Apresiasi kami kepada TAPD Provinsi Sumatera Barat yang telah dapat merampungkan hasil pembahasan Ranperda Tentang Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2. Mencermati hasil pembahasan Banggar bersama TAPD terhadap struktur APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6.269.132.092.948,- terdiri dari :
- PAD sebesar Rp.2.827.388.541.948,-
- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.423.868.351.000,-
- Lain-Lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 17.875.200.000,-

b. Belanja Daerah sebesar Rp. 6.433.050.092.948,- terdiri dari :
- Belanja Operasi sebesar Rp. 4.410.946.239.890,-
- Belanja modal sebesar Rp. 577.642.326.595,-
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 26.947.070.362,-
- Belanja Transfer sebesar Rp. 891.337.199.489,-

c. Defisit Rp. 163.918.000.000,-

d. Pembiayaan Daerah
- Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 194.918.000.000,-
- Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 31.000.000.000,-

- **Pembiayaan netto sebesar Rp.163.918.000.000,-**

Yang mana hal tersebut menurut hemat Fraksi masih memliki ruangan yang luas untuk di tingkatkan lagi berdasarkan kondisi fiskal daerah Sumber daya alami dan pengelolahan aset dan kekayaan daerah

Dalam pembahasan usaha pemaksimalan PAD di sebutkan potensi pajak kenderaan bermotor roda 2 dan Roda 4 serta bea balik pajak kenderaan bermotor masih di laksnakan dengan setengah hati yang memberikan ruangan kepada pelanggaran pajak dan bea balik kenderaan bermotor. Di temukan juga tunggakan pajak yang sangat akut bahkan pada kenderaan plat merah dan kepemilikan atas nama daerah.

Dalam hal ini Fraksi berpendapat, bahwa kedisiplinan objek pajak masyarakat akan dapat di pungut dengan maksimal dengan memberikan contoh wajib pajak kalangan atas dan menengah terutama para pejabat disiplin dalam menunaikan kewajibannya.

Pemungutan pajak akan terhindar dari penyimpangan dan kesalahan bila dilakukan dengan sistem digitalisasi dan hal ini sudah di laksanakan pada OPD OPD serta BUMD suatu daerah di Sumatera Barat.

Signalemen OPD terkait dengan pendapatan pajak sumber PAD 48 % dari total APBD dapat di tingkatkan kalau objek pajak ataun kesadarannya di tingkatkan dari 57,67 % atau tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi di atas 70 %. coba bayangankan, kalau kepatuhannya 70 % maka PAD jauh lebih besar, sementara kesadaran sekarang 57, 67 %.

Oleh sebab itu Fraksi berpendapatan Bapenda dan OPD terkait perlu berkabolorasi dengan aparatur lain untuk mewujudkannya, termasuk dengan kepolisian daerah dan pemuka masyarakat sertab pemuka adat. Aparatur harus jeput bola, dor to dor dari rumah ke rumah untuk menyampaikan surat peringatan membayar pajak.

Fraksi mengapresiasi pemprov dalam menggunakan aplikasi signal, masyarakat tidak antrian dan berlama lama dalam mengurus pembayaran pajak, bekerja sama dengan jasa raharja dan polda Sumatera Barat dalam program pemutihan pajak keendraaan bermotor, membebaskan bea balik keeenderaan bermotor juga

mendiskon sebesar 25 % bila 60 hari jatuh tempo, dan 20 % bila 30 hari jatuh tempo pembayaran.

Termasuk yang juga Fraksi tanggapi tentang pajak permukaan air (PAP) yang zonk pada akhir akhir ini yang msetinya kita dapatkan karena waduk Koto Panjang membentang dari wilayah Pasaman, 50 Kota dan bermuara di provinsi Riau
Fraksi berharap kepada pemda ke depan untuk APBD 2026 agar intesifikasi pendapatan PKB, BBNKB,PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat (PAB) Pajak MBLB dapat terealisasikan dengan signifikan.

Selanjutnya Fraksi menyoroti pendapatan daerah yang di pisahkan terutama Bank Nagari, PT bailirung Citra Jaya, PT Jamkkrida, Askkrida, Dinamika, grafika, PT Rizki Bukit Barisan agar memperbaiki penatakelolahannya, restrukturisasi, perbaikan manajerial suatu keharusan bukan suatu keniscayaan. Kita contohkan jika dalam kondisi 2024 Bank Nagari berkontribusi 113 M dan 2025 di perkirakan sebesar Rp 117 M

Pendapatan Daerah yang sepakati oleh Banggar dan TAPD Rp 6.269.132.092.948 dengan basaran PAD Rp. 2.827.388.541.948 yang bersumber dari PKB,BPNKB,PBBKB,PAP,Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, pajak MBLB dan dari restribusi daerah Rp Rp. 425.971.674.668 yang terdiri dari restribusi jasa umum, Jasa Usaha dan perizinan tertentu

Pendapatan Daerah dari hasil kekayaan di pisahkan Rp. 144.997.550.508 dan lain lain pendapatan yang sah Rp.

146.991.169.401 yang bersumber dari hasil penjualan BMD, Hasil pemanfaatan BMD, hasil kerjasama daerah , jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan TGR, Denda Pajak daerah dan BLUD

Pendapatan Transfer sebesar Rp 3.423.868.351.000 yang terdiri dari 1 dana perimbangan meliputi dana transfer umum, DBH, DAU dana trasfer khusus fisik non fisik dana intensif daerah dan Lain Lain pendapatan Yang sah sebesar Rp 17.875.200.000 yang berasal sumbangan pihak 3.

(1) Belanja Daerah

Belanja Daerah Sebesar Rp 6.433.050.092.584 yang terdiri dari belanja operasi Rp 4.410.946.239.890 yang terdiri dari belanja pegawai , tambahan penghasilan ASN, Tambahan Objek lainnya, gaji dan tunjangan DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, penerimaan lainnya pimpinan /KDH/WKDH dan belanja pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa, belanja pemeliharaan, Belanja dan jasa BOS, Belanja Jasa BIUD, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Modal, Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan serta belanja Aset Lainnya

Sehubungan dengan Belanja Daerah ini Fraksi PAN menyampaikan kepada seluruh OPD, UPTD, UPT dan BLUD agar melaksanakan pembelanjaan berbasis kebutuhan dengan efektif dan efesien, melaksanakan rasionalisasi, dan meningkatkan dan optimalisasi tunjangan berbasis kinerja yang sesuai dengan klasifkasi jabatan

dan golongan serta memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan ASN, honorarium dengan segala jenis dan tingkatannya dan Fraksi menegaskan rasionalisasi Belanja tekhnis, pemeliharaan, aset, gedung dan lainnya

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan melafaskan Bismillahirahmanirrahim serta berserah diri kepada Allah SWT dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah APBD 2025 agar di tindaklanjuti sesuain dengan mekanisme yang ada. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan.

وَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 04 November 2024

FRAKSI PAN DPRD SUMATERA BARAT

MAHAYATUL, SE, MSi.	H. DASWANTO, SE
KETUA	SEKRETARIS

H. INDRA DT RAJO LELO, SH., MM	**: PENASEHAT FRAKSI**
MUHAYATUL, SE,M.Si	**: KETUA FRAKSI**
H. MUZLI M.NUR, S.PD	**: WAKIL KETUA FRAKSI**
H. DASWANTO, SE	**: SEKRETARIS FRAKSI**
LASTUTI DARNI, S.Pd	**: BENDAHARA FRAKSI**
HENDRA HALIM	**: ANGGOTA FRAKSI**
RIDWAN DT TUMBIJO	**: ANGGOTA FRAKSI**
MASRISAL, SH	**: ANGGOTA FRAKSI**

PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2024 – 2029

TERHADAP

1. **RANPERDA APBD TAHUN 2025**
2. **PROPEMPERDA TAHUN 2025**
3. **RENJA DPRD TAHUN 2025 DAN RENJA DPRD 5 (LIMA) TAHUNAN**

DISAMPAIKAN OLEH : JEFRI MASRUL. SE

DALAM

RAPAT KERJA PEMBAHASAN AKHIR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL, 26 NOVEMBER 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat
DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2024 – 2029
Terhadap

1. **Ranperda APBD Tahun 2025**
2. **Propemperda Tahun 2025**
3. **Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan**

Tanggal, 26 November 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr Wb, Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati; Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Saudara Sekretaris Daerah, Staff Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran Aparatur Sipil Negara yang telah membersamai kita semua dalam pembahasan program kegiatan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Kerja Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan

Sembari mengharap Rahmat dan RidhaNya, dalam kesempatan pertama ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wat 'ala*, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, kita dapat hadir untuk saling bersilaturrahmi dan saling berintegrasi dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap **Ranperda APBD Tahun 2025, Propemperda Tahun 2025, Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan**, Aamiin Yaa Rabbal Alamiiin.

Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan sebesar besarnya kepada sosok pembaharu dunia, junjungan Islam Nabiyullah Muhammad Salalallahu Hu A'laihi Wassalam, yang telah berjasa besar bagi kemajuan peradaban dunia selayaknya yang kita sama-sama rasakan di saat ini.

Wabil khusus kepada Saudara Pimpinan Rapat, kami mengucapkan terimakasih atas diberikannya kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Sebagai penyelenggara pemerintahan dan regulator daerah Provinsi Sumatera Barat, Saudara Gubernur telah menyampaikan Penjelasan dan tanggapan Gubernur Sumatera Barat mengenai **Ranperda APBD Tahun 2025.** Disamping itu pada kesempatan yang berbeda kita juga sudah melakukan pembahasan terhadap **Propemperda Tahun 2025, berikut juga Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan**, maka sudah selayaknya bagi Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan materi-materi sebagaimana diatas.
Menanggapi Penjelasan dan tanggapan saudara Gubernur Sumatera Barat terhadap **Ranperda APBD Tahun 2025, Propemperda Tahun 2025, berikut juga Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan**, maka setelah melihat, mendengar, membaca, mempelajari dan menelaah dari setiap materi pembahasan, menyangkut hal-hal sebagaimana diatas, izinkanlah Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pendapat Akhir yang disajikan dalam satu paket penyajian pendapat akhir dengan sistematika sebagai berikut :

I. **Ranperda APBD Tahun 2025**

   Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, memiliki arti penting dan bernilai strategis dalam pembangunan daerah Sumatera Barat. RAPBD juga menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Visi-Misi pembangunan daerah.

Dalam penjelasannya saudara Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 akan diarahkan serta di fokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola pemerintahan sebagai Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target Pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai tepat waktu dengan pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas Pembangunan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam RKPD Tahun 2025.

Fraksi Partai Demokrat merespons positif terkait cita-cita RAPBD tahun 2025 ke depan yang akan diarahkan untuk melaksanakan Pembangunan dengan tema **Pembangunan tahun 2025 yaitu Yaitu Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Ingklusif Dan Berkelanjutan.**

Tema ini dimaknai sebagai Pembangunan yang dilaksanakan untuk mengakselerasi produktivitas sektor strategis ekonomi, pertanian, perdagangan dan pariwisata serta pembangunan yang dilaksanakan secara ingklusif dan berkelanjutan melalui penguatan fundamental perekonomian daerah, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan serta memastikan seluruh Masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap pelayanan dasar minimal.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur Pembangunan sebagaimana tema **Pembangunan tahun 2025 diatas**, Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap konsisten dengan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, yang akan dijalankan dengan tetap mempertimbangkan dinamika isu strategis, RPJPN 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045. Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mampu menjaga konsistensi pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka Panjang.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah, untuk itu Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mampu menjaga konsistensi pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap berpedoman pada dokumen tersebut.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025 harus mencerminkan kebutuhan real masyarakat dengan mengutamakan penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan memprioritaskan program untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, maka disepakati komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar **Rp. 6,269,132,092,948,-** (*Enam Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), dan **besaran belanja daerah** sebesar **RP. 6,433,050,092,948,-** *(Enam Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)*, dari proyeksi sebagaimana diatas maka diprediksi Sumatera Barat akan mengalami inflasi sebesar Rp. **163.918.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) pada Tahun Anggaran 2025.**

Berikut komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebegai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.6.269.132.092.948,-
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 2.827.388.541.948,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 3.423.868.351.000,-
c. Lain-Lain PAD Yg sah	Rp. 17.875.200.000,-
2. Belanja Daerah	Rp. 6.433.050.092.98,-
a. Belanja Operasi	Rp. 4.410.946.239.890,-
b. Belanja Modal	Rp. 577.642.326.595-
c. Belanja Tidak Terduga (BTT)	Rp. 26.974.070./362,-
d. Belanja Transfer	Rp. 891.337.199.489,-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 194.100.970.842,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 31.000.000.000,-

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan realitas Proyeksi Pendapatan Daerah dan besaran Belanja Daerah Tahun 2025 Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat menyadari dengan sesungguhnya dinamika ekonomi yang terus mengalami turbulensi akan berakibat kurang bagus bagi pertumbuhan ekonomi daerah, maka dari itu kami memandang perlu untuk mengingatkan saudara Gubernur beserta jajaran eksekutif agar lebih kreatif mencari sumber-sumber kegiatan baru secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat, yang pada gilirannya akan mampu untuk mengcover seluruh kebutuhan daerah Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan tema misi **pembangunan tahun 2025** yang mampu mengakselerasi produktivitas sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang ingklusif dan berkelanjutan.

Pada era yang serba maju seperti sekarang, Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif, yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memastikan agar pendidikan di Provinsi Sumatera Barat lebih berkualitas dan merata. Bagaimana pun, sejumlah tantangan masih dihadapi di Provinsi Sumatera Barat , di mana aksesibilitas pendidikan belum merata, masih terdapat wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri (*blank spot* area pendidikan negeri). Selain itu, diketahui bersama dalam beberapa tahun terakhir Provinsi Sumatera Barat menghadapi masalah masih kurangnya jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi atau memiliki sertifikasi. Dimana, Pada saat bersamaan, banyak tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun, di mana jumlahnya tidak dapat ditutupi dengan jumlah penambahan guru baru.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diatasi adalah angka putus sekolah yang masih terjadi.

Masih berkaitan dengan persoalan Sumber Daya Manusia. Saat ini kita masih berhadapan dengan persoalan *stunting*. Meskipun semakin turun tiap tahunnya, namun angka prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat masih cukup tinggi. Ini menunjukkan pemenuhan gizi masyarakat masih kurang.

Catatan Fraksi Partai Demokrat yang terakhir adalah menyangkut tata kelola pemerintahan. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar terus mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik berbasis digital. Dalam jangka panjang, penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah keniscayaan. Dalam hemat Fraksi Partai Demokrat, sistem pelayanan publik yang terintegrasi akan membuat kinerja pemerintah meningkat dan mampu memuaskan warga Masyarakat.

Akhirnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah melalui pembahasan yang alot dan dinamis, dengan senantiasa berharap Rahmat dan bimbingan dari Allah, Tuhan Yang Masa Esa, Fraksi Partai Demokrat **SETUJU** dan **MEREKOMENDASI** untuk ditetapkannya **Ranperda APBD Tahun 2025** menjadi **APBD Tahun 2025** sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

II. Propemperda Tahun 2025

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, untuk mewujudkan kepastian hukum yang berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya dalam pembentukan peraturan daerah mesti disusun terlebih dahulu melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda).

Propemperda merupakan amanat undang-undang sebagaimana ketentuan *pasal 239 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya disebutkan bahwa perencanaan, penyusunan perda yang dilakukan dalam program pembentukan perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.*

Penyusunan propemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda, baik usulan yang disampaikan oleh pihak eksekutif maupun usulan yang di inisiasi oleh anggota legislatif. Dimana berdasarkan inventarisasi usulan Raperda yang diterima Bapemperda, keseluruhannya adalah menyangkut hal-hal yang sangat urgen bagi kemajuan Pembangunan Sumatera Barat kedepan. Diantaranya adalah;

NO.	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KOMISI	PENDAPAT FRAKSI
1.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	PEMDA	I	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
2.	Penyelenggaraan Penyiaran Di Daerah	DPRD	I	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
3.	Penyelenggaraan KetenagakerJaan.	PEMDA	II	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
4.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPRD	II	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
5.	Ranperda tentang Pengelolaan Mangrove.	DPRD	II	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	PEMDA	III	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan

7.	Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha.	PEMDA	III	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perseroan Terbatas.	PEMDA	III	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
9.	Jasa Konstmksi	PEMDA	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
10.	Penyelenggaraan Jalan.	PEMDA	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
11.	Penbahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman Tahun 2016-2035.	PEMDA	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
12.	Rencana Tata Ruang Wilayah	PEMDA	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
13.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sepadan Danau dan Sungai	DPRD	IV	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan

14.	Pengelolaan Pesantren.	DPRD	V	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
15.	Perubahan Atas Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	DPRD	V	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
16.	Pelayanan Mutu Kesehatan	DPRD	V	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
17.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	PEMDA	Banggar	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
18.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	PEMDA	Banggar	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
19.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	PEMDA	Banggar	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan
20.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.	PEMDA	Pansus	Setuju dilanjutkan pembahasan dan ditetapkan

Dari 20 (Dua Puluh) Raperda yang diusulkan tersebut, setelah, melihat, mempelajari, menganalisis dan berdiskusi, akhirnya Fraksi Demokrat Provinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk menetapkan keseluruhan Raperda yang di usulkan agar dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan darah Sumatera Barat.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

III. Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahunan

Setelah memperhatikan dan memahami draft program, kegiatan dan indikator serta target capaian kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, yang terdiri atas *40 halaman*, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahunan **telah sejalan** dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ***Pemerintahan Daerah*** yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Bersama Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Kerja DPRD (Renja DPRD) bertujuan untuk menjadi pedoman terstruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui Renja ini, program dan kegiatan DPRD diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, seperti RPJMD, sehingga kegiatan DPRD dapat mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah secara optimal. Renja juga memastikan pengalokasian anggaran yang transparan dan efisien, memfokuskan kegiatan DPRD pada prioritas yang berdampak nyata bagi Masyarakat.

DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pemerintah daerah berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di daerah berdasarkan program yang telah disusun bersama yang dituangkan pada Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025-2045, Perda RPJMD 2025-2030 dan Nota kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS APBD tahun Anggaran 2025, sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2024 – 2029 Terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, Propemperda Tahun 2025, Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Billahitaufiq Wal-hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 26 November 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

DONI HARSIVA YANDRA, S.IP, M.E	**H. GINNO IRWAN**
Ketua	**Sekretaris**

ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

JEFFRI MASRUL, S.E.	HJ. AIDA, S.H.
BENNI SASWIN, S.E.	AGUS SYAHDEMAN, S.E.
HJ. YESI ENDRIANI, S.M.	ALI MUDA, S.H.



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TERHADAP

1. Ranperda APBD Tahun 2025
2. Propemperda Tahun 2025
3. Renja DPRD Tahun 2025, dan Renja DPRD 5 (lima) Tahun

Disampaikan Dalam :

Rapat Kerja Pembahasan Akhir
Selasa / 26 November 2024

==========

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Saudara Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat ***Allah Subhanahu wa ta'ala***, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Kerja

Pembahasan Akhir ini dalam keadaan sehat wal'afiat, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Shalawat beserta salam kita kirimkan untuk Nabi besar ***Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam***,' yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada kita untuk kebahagian di dunia dan akhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnahnya.

Selanjutnya, melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir** Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan Renja DPRD Tahun 2025 serta Renja DPRD 5 (lima) tahunan*** .

Pimpinan Rapat, Anggota Dewan yang kami hormati,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Mitra Kerja dalam hal ini OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat, yang sudah melakukan pembahasan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, dan apresiasi kami sampaikan juga kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Sumatera Barat, dimana telah mempertajam pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025 dengan menerima saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD.

Teruntuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang telah melakukan pembahasan Propemperda Tahun 2025, Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan, tentu kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya.

Pimpinan Rapat, Hadirin yang kami hormati,

Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah melalui mekanisme yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rancangan Peraturan Daerah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menentukan arah kebijakan dari semua sektor pembangunan serta fasilitas pendukung lainnya, termasuk Propemperda Tahun 2025. Propemperda merupakan cikal bakal Peraturan Daerah dalam satu tahun anggaran yang berisi konsepsi ranperda berdasarkan skala prioritas. Dengan adanya Propemperda diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai target. Namun target kinerja yang akan kita lakukan, tidak bisa dilepaskan dengan adanya Rencana Kerja (Renja) DPRD yang berfungsi sebagai pedoman dan landasan yuridis bagi anggota dan pimpinan DPRD dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan tugas kedewanan.

Sebelum kami menyampaikan substansi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, Propemperda 2025 dan Renja DPRD 2025 serta Renja DPRD 5 (lima) Tahunan, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dirasa perlu menyampaikan beberapa pendapat dan saran sebagai berikut :

1. Ranperda APBD Tahun 2025

Proses penyusunan APBD Tahun 2025 bukan sekedar naik turun nilai anggaran, akan tetapi pencapaian-pencapaian pada periode sebelumnya, serta memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan difisit atau surflus anggaran. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan, sebagai berikut :

a) Makro ekonomi daerah Tahun 2025 yang dijadikan asumsi dalam penyusunan APBD Tahun 2025, sebagian besar masih di bawah rata-rata nasional. Dengan asumsi tersebut, maka provinsi Sumatera Barat akan semakin tertinggal dari provinsi tetangga yang semakin maju dan semakin berkembang. Ini menjukan ada yang salah dalam kebijakan dan arah pembangunan daerah. Untuk itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih progresif dan mengoptimalkan semua potensi sumber daya untuk mempercepat gerak Pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalan daerah.

b) Target pendapatan dan alokasi belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2025 masih jauh dari kebutuhan untuk mewujudkan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan target base line RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Dengan kondisi tersebut, tentu akan berdampak terhadap capaian target kinerja Pembangunan daerah dan apalagi tahun 2025 merupakan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, masa jabatan Tahun 2021-2025. Oleh sebab itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025 dan tidak adalagi alasan-alasan dari Kepala OPD yang tidak sanggung melaksanakannya. Apabila Kepala OPD tidak sanggup melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025, maka sebaiknya yang bersangkutan di ganti dengan pejabat lain yang lebih progresif.

c) Kinerja pengelolaan pendapatan daerah terutama dari sektor PAD yang terdapat dalam APBD Tahun 2025, masih jauh dari harapan. Masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap dengan maksimal, seperti pada objek PKB, BBNKB, PAB, PAP. Demikian juga dengan pemanfaatan asset daerah, baik yang dikelola sendiri maupun yang

dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Untuk itu, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisasi aparat yang terkait dalam pengelolaan PAD dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selanjutnya diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan up date data objek PKB dan meninjau Kerjasama pemanfaatan asset daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan PKB.

d) Dari hasil finalisasi pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025, disepakati komposisi struktur anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah	**Rp. 6,269,132,092,948.00**
a. PAD	Rp. 2,827,388,541,948.00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 3,423,868,351,000.00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 17,875,200,000.00
2.Belanja Daerah	**Rp. 6,433,050,092,948.00**
a. Belanja Operasional	Rp. 4,410,946,239,890.00
b. Belanja Modal	Rp. 577,642,326,595.00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 26,974,070,362.00
d. Belanja Transfer	Rp. 891,337,199,489.00
3.Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 194,918,000,000.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 31,000,000,000.00

2. Propemperda Tahun 2025

Peraturan Daerah Provinsi adalah produk hukum regional ditingkat Provinsi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan bersama dengan DPRD, yang pembentukannya dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan perundangan. Sebagimana Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta serta mempedomani permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah, dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dilingkungan pemerintah Daerah Kepada Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) melalui pimpinan DPRD.

Setelah mencermati dokumen propemperda, terdapat 20 ranperda ditahun 2025, maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyakini apa-apa yang sudah dibahas oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah memenuhi unsur dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan hukum didaerah dan berjalan selaras dengan sistem hukum nasional.

3. Renja DPRD Tahun 2025, dan Renja DPRD 5 (lima) Tahun

Renja DPRD merupakan dokumen perencanaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, dan aspiriasi masyarakat. Renja DPRD sendiri merupakan bagian dari rangkaian system perencanaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, sekaligus tahap awal implementasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045.

Maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengajak kita semua, bahwa Rencana Kerja (Renja) DPRD yang akan ditetapkan dalam keputusan DPRD nantinya, diharapkan secara bersama-sama, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berpedoman kepada Renja DPRD, karena merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana strategis, target kinerja, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah lainnya yang melibatkan seluruh elemen, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pimpinan Rapat hadirin yang kami hormati,

Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan ini ***Menyetujui*** *Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, untuk* ***ditetapkan*** *menjadi* ***Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.***

Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ***Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan Renja DPRD Tahun 2025 serta Renja DPRD 5 (lima) tahunan,*** untuk ditetapkan menjadi **Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat.**

Pimpinan Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormat,

Demiklanlah Pendapat Akhir Fraksi Partal Persatuan Pembangunan, kami sebagai juru bicara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, manakala ada hal-hal yang tidak berkenan bagi para pihak.

wabillahi taufiq wal hidayah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
JURU BICARA

H. DASWIPPETRA DT.MANJINJIANG ALAM, SE,M.Si

S A W A L, SH	**Hj. NELDASWENTI, M.Si**
KETUA	**SEKRETARIS**

F - PPP/9

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

1. **TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**
2. **TENTANG PROPEMPERDA TAHUN 2025**
3. **TENTANG RENJA DPRD TAHUN 2025 DAN RENJA DPRD 5 (LIMA) TAHUNAN 2024-2029**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/Kepala di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Para Wartawan, undangan serta hadirin yang berbahagia.

Hadirin yang kami muliakan,

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan

Pendapat Akhir terhadap tiga Ranperda di atas , dan seizin Pimpinan Rapat ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena dengan seizin-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Kerja Pembahsan Akhir hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, serta mari kita sampaikan juga shalawat dan salam kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan-minazzulumati ilannur sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Hadirin yang kami muliakan,

Sebelum kami membacakan pandangan akhir Fraksi kami ini, izinkan terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan :

> *Besok tanggal 27 November 2024 adalah hari dimana kita menentukan pilihan untuk Pimpinan Daerah (Pilkada) se Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat khususnya, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengajak kita untuk dapat kiranya kita bersama-sama menjaga keharmonisan agar Sumatera Barat yang kita cintai ini selalu damai ; '* ***PEMILU ADALAH PANGGUNG DEMOKRASI DIMANA KITA SEMUA MEMILIKI SUARA, MARI GUNAKAN HAK KITA DENGAN BIJAKSANA DAN HORMATI PILIHAN ORANG LAIN'***

Terimakasih kepada rekan-rekan Badan Anggaran bersama TAPD yang telah maksimal melakukan pembahasan sehingga Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang diberikan dan juga ucapan terimakasih Fraksi kami sampaikan kepada Tim Pembahasan Propemperda, Tim Pembahasan Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan 2024-2029 atas kerja Tim sehingga hari ini dapat kita laksanakan kegiatan untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi kita masing-

masing sebagai akhir dari prosesnya. Selanjutnya izinkanlah kami membacakan pandangan akhir Fraksi kami sebagai berikut :

1. RANPERDA TENTANG APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025.

APBD Tahun 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah beberapa waktu yang lalu dan telah melalui pembahasan yang serius antara Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat (Banggar) dapat tergambarkan garis besar kinerja pemerintah selama satu tahun terhadap perencanaan, program dan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun 2025. Apakah anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan satu tahun dan direlaisasikan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Sumatera Barat, hasil proses terebut dituangkan dalam satu peraturan daerah (perda) yang saat ini sedang berlangsung tahap akhir, izinlah Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyapaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1. Setelah membaca laporan Banggar bersama TAPD terkait PAD dimana terjadi beberapa koreksi untuk meningkatnya, maka Fraksi PDI perjuangan dan PKB meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar-benar dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Rapat Banggar bersama TAPD yang sudah tercantum dalam laporan. Fraksi kami juga menekankan agar kinerja OPD terkait lebih terukur, karna PAD sangatlah singnifikan pengaruhnya dalam postur APBD.

2. Sekaitan dengan poin satu di atas Fraksi kami menyikapi laporan terhadap Pendapatan Daerah yang ditargetkan *sebesar Rp. 5.658.065.098.875,- jauh dibawah target RPJMD yaitu sebesar Rp. 7.611.087.610.000,- dan target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 6.586.576.217.900,-*, dimana untuk melakukan peningkatannya selalu terkonsentrasi pada pajak dan retribusi daerah, menurut Fraksi kami

seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah dapat melakukan peningkatan nilai PAD tidak terfokus pada pajak dan retribusi saja tetapi semua sektor PAD harus dapat ditingkatkan, kenapan hal ini kami sampaikan, karena sektor pajak ini terkesan dalam pembuatan rencananya dilakukan dengan angka minimal dan apa bila terjadi persoalan pada pendapatan maka PAD dapat dikoreksi untuk ditingkatakan, kedepan hal ini dapat dihindari.

3. Pada sektor Belanja Daerah, sebagaimana yang Fraksi kami sampaikan pada Pandangan Umum yang lalu bahwa Belanja Modal sangat penting untuk Pembangunan Daerah Sumatera Barat agar perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sependapat dengan laporan Banggar bersama TAP bahwa alokasi belanja modal yang semula disediakan sebesar Rp. 389.747.773.595,- bertambah sebesar Rp. 187.894.553.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 577.642.326.595,-. *Meskipun terjadi peningkatan belanja modal, namun alokasinya masih jauh dari alokasi yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 14 % dari total belanja dan masih jauh dari upaya untuk memenuhi alokasi belanja modal infrastruktur pelayanan publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 40 % dari total alokasi belanja daerah.* Sekaitan dengan hal ini Fraksi kami menyampaikan bahwa pada posisi belanja modal ini pemerintah daerah seharusnya sudah dapat melakukan kajian dalam menggali untuk meningkatkan anggaran karena beberapa tanggung jawab/kewenangan provinsi yang berada di Kabupaten/Kota terutama masalah jalan hingga saat ini belum mendapatkan solusi diantaranya ruas jalan di Kabuapten Dharmasraya yaitu ruas jalan Simpang Sikabau - Simpang Koto Baru sepanjang 29 km mengalami kerusakan dibeberapa titik, sehingga menyebabkan akses dan mobilitas menjadi

terhambat dan tidak lancar, saran Fraksi kami persoalan ini menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu terhadap Kab. Kep. Mentawai yang oleh Pemerintah Pusat sudah di tidak lagi menjadi Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), namun menurut Fraksi kami Kab. Kep. Mentawai masih perlu menjadi perhatian karena hingga saat ini daerah ini belum mendapat azaz keadilan dalam Pembangunan di oleh Pemerintah Darah Prov. Sumatera Barat, maka Fraksi kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat kiranya menjembatani Pembangunan di Kab. Kep. Mentawai ke Pemerintah Pusat.

4. Masih pada posisi belanja modal dimana salah satu catatan dari Banggar; *Untuk alokasi belanja modal, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah untuk konsisten secara terus menerus meningkatkan alokasi belanja modal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam upaya percepatan Pembangunan Daerah dan mengejar ketertinggalan dengan provinsi tetangga.* Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan pengingatan saja agar UU No 1 Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2027 mendatang maka perlu di lakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah. Peningkatan kapasitas SDM ini perlu di lakukan.

5. Terkait dengan pelaksanaan APBD Tahun 2025, Fraksi kami meminta masing-masing OPD agar dapat melaksanakan program kerja secara maksimal, dengan PAGU anggaran yang telah ditetapkan di APBD Tahun Anggaran 2025 ini serta perlu pengawasan internal, agar program pembangunan berjalan dengan baik. Fraksi kami juga menekankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat

mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di tahun mendatang, serta menciptakan potensi ekonomi baru, meningkatkan ekonomi biru dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat, dan juga yang berkenaan dengan berbagai program pembangunan, diharapkan kualitas dari proyek infrastruktur bisa lebih baik, agar masyarakat dapat memperoleh manfaatnya."Pergunakan anggaran secara efektif dan efisien," dan diharapkan pula, seluruh pelaksana kegiatan APBD harus taat hukum, kaji lagi sistem pengendalian yang lebih efektif di setiap proyek sehingga tidak melakukan tindakan korupsi.

6. Fraksi kami mengingatkan akan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada tahun yang lalu, penerapan sistem digitalisasi ini harus segera dilakukan di berbagai sektor, terutama dalam hal penerimaan dan belanja daerah, agar transparansi dan efisiensi dapat tercapai lebih optimal.

7. Diharapkan OPD-OPD mampu menampung kegiatan-kegiatan yang di usulkan oleh anggota DPRD, yang sudah ditatapkan dalam APBD Tahun 2025 ini meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksi akan dinamis.

2. TENTANG PROPEMPERDA TAHUN 2025

Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan. Dan berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa

perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam penyususnan Propemperda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Gubernur serta Pasal 15 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yaitu pemilihan usulan ranperda yang akan dimasukkan dalam Propemperda harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah juga tentang visi-misi kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana pada periode Tahun 2025 sudah memasuki periode Visi-Misi Kepala Daerah terpilih Pilkada 2024.

Setelah melalui rangkaian pembahasan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1) Tentang ditetapkannya sebanyak 13 (tiga belas) usulan Ranperda dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 7 (tujuh) Ranperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah dua 20 (dua puluh) Ranperda yang akan dituangkan dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Sekaitan dengan hal ini Fraksi kami mengajak kita semua untuk dapat kiranya melakukan evaluasi terhadap jumlah Propemperda tahun 2025 yang menurut Fraksi kami cukup banyak, dan Fraksi kami menyarankan mari kita pilah kembali Propemperda ini mana yang menjadi skala perioritas untuk tahun 2025 nanti.

2) Seandainya usulan Fraksi kami pada poin satu di atas diterima/tidak diterima Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dapat menerima

Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini menjadi keputusan dan dilaksanakan sebaik-baiknya serta mendorong Bapemperda untuk dapat kiranya mendorong Komisi-komisi/Pansus yang ditugaskan membahas Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda untuk dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan termasuk melakukan sosialisasi Ranperda yang telah menjadi Perda kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui dan memahami.

3. **TENTANG RENCANA KERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 DAN RENCANA KERJA DPRD 5 (LIMA) TAHUNAN**

A. **Tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

Dalam pasal 95 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur peneyelenggaran pemerintahan daerah/mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah darah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efesiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana dibunyikan dalam pendahuluan laporan pembahasan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sebagaimana yang disampaikan UU No 23 Tahun 2014 pasal 95 ayat (1) diatas maka dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi, tugas, hak dan kewenangan yang strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya pembahasan rancangan perda, pembahasan anggaran dan pengawasan serta tugas-tugas konstitusional lainnya sebagaimana yang

tertuang dalam Bamus, maka Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengharapkan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini medapat dukungan penuh oleh Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Fraksi PDI Perjuagan dan PKB dapat menerima Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini menjadi sebuah keputusan sehingga dokumen Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan/pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai anggota DPRD. Terakhir terimakasih pada kawan-kawan Bamus yang telah merampungkan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini.

B. **Rencana Kerja DPRD 5 (Lima) Tahunan 2024-2029**

Setelah membaca rancangan Renja DPRD lima tahunan 2024-2029 yang merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran dan capaian target kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, hak dan kewenangan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, izinkan Fraksi PDI perjuangan dan PKB menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari hasil Evaluasi Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 20219-2024, bahwa dalam *pelaksanaan kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, terdapat cukup banyak kelemahan - kelemahan, diantaranya: Masih banyak ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang belum mencerminkan kebutuhan masyarakat atau Ranperda yang sangat prioritas.* Sekaitan dengan hasil evaluasi ini maka kedepan Fraksi kami berharap agar kita selektif dalam pembahasan Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan

tujuan Ranperda-ranperda diusulkan dapat memberikan manfaat oleh masyarakat Sumatera Barat.

2. Untuk target kinerja lima tahunan yang akan dicapai dari kegiatan Pembahasan Perda selama periodesasi masa jabatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029, adalah: 1) Disusunnya sebanyak 25 Ranperda Usul Prakarsa DPRD 1 (satu) Ranperda setiap Komisi selama 5 Tahun. 2). Disusunnya Propemperda Provinsi Sumatera Barat (Propemperda Tahun 2025, Tahun 2026, Tahun 2027,Tahun 2028 dan Tahun 2029), 3). Dibahasnya dan disepakatinya sebanyak 75 Ranperda (15 Ranperda/Tahun), 4). Disepakatinya Ranperda tentang APBD dan Perubahan APBD tepat waktu. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyarankan jumlah Ranperda yang akan kita bahas pertahun mohon dikurangi sebagaimana yang kami sampaikan dalam pendapat di Propemperda.

Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, dan para hadirin yang berbahagia.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Propemperda Tahun 2025, Renja DPRD Tahunan dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan ini kami sampaikan, selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dapat menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, Propemperda Tahun 2025 , Renja DPRD Tahunan (2025) dan Renja DPRD lima (5) Tahunan 2024-2029 untuk di sahkan dengan segala harapan yang kami sampaikan di atas agar menjadi perhatian dikemudian hari oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bagi kita dalam menjalankan Fungsi serta kewajiban kita. Atas segala perhatian Rapat Kerja ini kami ucapkan terimaksih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 26 November 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman, SE
Ketua

Donizar
Sekretaris

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 November 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Dari Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-5081 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp6.274.132.092.948,00 (enam triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.832.388.541.948,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
    a. Pajak Daerah;
    b. Retribusi Daerah;
    c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.114.428.147.371,00 (dua triliun seratus empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.152.450.667,00 (empat ratus delapan belas miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.997.550.509,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan rupiah).
(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.154.810.393.401,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari jenis pendapatan transfer pemerintah pusat.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp17.875.200.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.875.200.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp6.438.050.092.948,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar lima puluh juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp4.651.549.209.669,70 (empat triliun enam ratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
    a. Belanja Pegawai;
    b. Belanja Barang dan Jasa;
    c. Belanja Subsidi; dan
    d. Belanja Hibah;
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.645.455.313.089,00 (dua triliun enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh sembilan rupiah).
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.844.469.337.396,70 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh rupiah).
(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.124.559.184,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp858.159.447.578,00 (delapan ratus lima puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.017.254.528,00 (tujuh belas miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.992.404.798,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.710.598.059,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp413.202.299.883,00 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.236.890.310,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp37.004.236.211,30 (tiga puluh tujuh miliar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp891.337.199.489,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp860.837.199.489,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.163.918.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yang terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebesar Rp.194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebesar Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.163.918.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp.163.918.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJM dengan Rancangan APBD;

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

YOZAWARDI USAMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025: (7-372/2024)

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 223

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.832.388.541.948,00**
4.1.01	Pajak Daerah	2.114.428.147.371,00
4.1.02	Retribusi Daerah	418.152.450.667,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	144.997.550.509,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	154.810.393.401,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.423.868.351.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.423.868.351.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.875.200.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.875.200.000,00
	Jumlah Pendapatan	**6.274.132.092.948,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.651.549.209.669,70**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.645.455.313.089,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.844.469.337.396,70
5.1.04	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	155.124.559.184,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**858.159.447.578,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.017.254.528,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.992.404.798,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.710.598.059,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	413.202.299.883,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.236.890.310,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**37.004.236.211,30**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	37.004.236.211,30
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**891.337.199.489,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	860.837.199.489,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	30.500.000.000,00
	Jumlah Belanja	**6.438.050.092.948,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-163.918.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**194.918.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.918.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**31.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	31.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**194.918.000.000,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**31.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**163.918.000.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Provinsi Sumatera Barat, 31 Desember 2024

Gubernur

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Dipindai dengan CamScanner